

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL
KEBERADAAN INDOMARET DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Serata Satu
Universitas Islam Riau

**Lanteria Hardiyanti
NPM : 147110482**

PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

PEKANBARU

2019

**EVALUASI PELAKSANAAN PENGAWASAN IZIN OPERASIONAL
KEBERADAAN INDOMARET DI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
OLEH DINAS KOPERASI USAHA KECIL MENENGAH
PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN**

ABSTRAK

Oleh
Lanteria Hardiyanti

Kata Kunci : Evaluasi, Pelaksanaan, Pengawasan Izin Indomaret

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat objektivitas Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Instrumen variabel penelitian menggunakan pendekatan teori sistem dengan dimensi variabel *Input, Process, Output, Outcome*. Tipe penelitian yang berlokasi di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi ini adalah *Tipe Deskriptif Kuantitatif* yaitu menuntut agar variabel yang diteliti dapat diukur, memprioritaskan daftar *Kuesioner* sebagai alat pengumpulan data dan data yang terkumpul kemudian dijadikan untuk menganalisis kondisi empiris dari obyektivitas keberadaan tujuan penelitian pada lokasi penelitian. Terdapat dua kelompok populasi dan sampel pada penelitian ini yaitu pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian sebanyak 5 Orang menggunakan *Teknik Random Sampling* dan Pelaku Usaha Indomaret sebanyak 9 Orang menggunakan *Teknik Sampling Jenuh*. Jenis dan sumber data yang digunakan terdiri data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui observasi, *Kuesioner*, dan Wawancara. Sementara teknik analisis data dibantu oleh aplikasi Statistik Stata Versi 14. Hasil dari Penelitian ini menggunakan pendekatan teori sistem dengan dimensi variabel *Input, Process, Output, Outcome*. Hasil indikator *Input* dalam penelitian ini berada pada kategori Setuju. Hasil indikator *Process* dalam penelitian ini berada pada kategori ragu-ragu. Hasil indikator *Output* pada penelitian ini berada pada kategori Ragu-ragu. Dan hasil Indikator *Outcome* pada penelitian ini berada pada kategori Tidak Setuju. Kesimpulan dari penelitian ini Rekomendasi yang perlu dilakukan terutama pada sumber daya manusianya dan organisasinya harus lebih meningkatkan pengawasan terhadap Indomaret.

EVALUATION OF OPERATIONAL LICENSE OF INDOMARET LICENSE
CONTROL IN KUANTAN DISTRICT, SINGINGI BY THE MINISTRY OF
SMALL MEDIUM TRADE AND INDUSTRY

ABSTRACT

By
Lanteria Hardiyanti

Keywords: Evaluation, Implementation, Monitoring of Indomaret Operational Permits

This study aims to study the objective level of the Evaluation of Indomaret Operational Permit Evaluation in Kuantan Singingi Regency by the Trade and Industry Cooperative Office. The research variable instrument uses studying system theory with dimensions of the Input, Process, Output, and Output variables. This type of research that is placed in the Office of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry in Kuantan Singingi Regency is a quantitative descriptive type that requires variables to be scrutinized, prioritize the list of questions and collected data to be used to find solutions for empirical research. Objective research objectives research sites. Obtained from two existing groups and the sample in this study were 5 people from the Department of Cooperatives, Small and Medium Enterprises, Trade and Industry Cooperatives using the Random Sampling Technique and 9 Indomaret Business Actors using the Saturated Sampling Technique. Types and sources of data used consist of primary data and secondary data. Data collection techniques through observation, questionnaires, and interviews. While the data analysis technique was carried out by the Statistical Application of Stata Version 14. The results of this study used system theory with dimensions of the Input, Process, Output, and Output variable. Put indicators in this study in the Agree category. The results of the Process Indicators in this study are in the doubt category. The Output Indicator Results in this study are in the category of Doubtfulness. And the results of the Indicators Results in this study in the category Disagree. Conclusions from this study Recommendations that need to be made on human resources and organizations should further improve supervision of Indomaret.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan nikmat yang telah diberikannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan dan penyusunan Skripsi ini dengan Judul **“Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret Di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian”**. Sebagai salah satu syarat guna meraih gelar Sarjana pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

Shalawat beserta salam kita hadiahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini.

Penulis telah berusaha semaksimal mungkin demi kesempurnaan Skripsi ini, tetapi karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki maka Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga dengan kerendahan hati penulis mohon kritik dan saran serta masukan dari pihak yang menginginkana kesempurnaan. Harapan penulis semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya terutama bagi penulis sendiri sehingga mendapat tambahan ilmu tentang administrasi publik di kemudian hari dan semoga Allah SWT senantiasa memberi limpahan kasih sayang kepada mereka yang telah membantu penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

Dalam usaha menyelesaikan Skripsi ini penulis banyak diberikan bantuan berupa waktu, tenaga, kritik, saran dari teman-teman demi kesempurnaan Skripsi

ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi kepada penulis terutama kepada :

1. Bapak Prof.DR.H. Syafrinaldi, S.H.,M.C.L. selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr.H. Moris Adidi Yogia, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam menuntut ilmu di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
3. Bapak Hendry Andry, S.Sos.,M.Si. selaku Ketua Program Studi Administrasi Publik yang telah banyak membantu penulis selama menjadi mahasiswi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang selama ini telah memberikan bekal kepada penulis sehingga penulis memiliki ilmu pengetahuan di bidang Administrasi Publik.
4. Bapak Drs. Parjiyana, M.Si. Selaku Pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memeriksa dan memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Skripsi Ini.
5. Bapak Andri Kurniawan, B.PM., M.Si. Selaku Pembimbing II yang juga telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk

memberikan bimbingan kepada penulis dalam proses penyelesaian Skripsi ini.

6. Kepada para Dosen-dosen dan Staf pengajar khususnya Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau terima kasih atas semua ilmu yang telah diberikan.
7. Bapak/Ibu Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang banyak berjasa melayani segala keperluan dan kelengkapan administrasi yang penulis butuhkan.
8. Terkhususnya Kedua Orang Tua, Papa Suhardi, S.P. dan Mama Yusnah yang selalu memberi semangat dan motivasi serta doanya kepada penulis agar dapat menyelesaikan Skripsi ini.
9. Abang Dikgo Hardi, adek Gita Hardi , Zaky Hardi dan Kak Rinda Mustikasari, S.P. yang telah memberi semangat kepada penulis agar penulis semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini.
10. Nenek Adima, Etek Indrawati yang telah memberikan doa dan semangat kepada Penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Sahabat Bella Arisfa, Agus Suherman, Aidil Putra, Ikhsan Ramadani dan Sukrizal yang selalu menemani dan memberi kebahagiaan masa kuliah serta dukungan dan semangat kepada penulis dan teman-teman seperjuangan di Prodi Administrasi Publik Khususnya Administrasi Publik C angkatan 2014 yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

12. Teman Wilia Satria, S.Kom., Fera Mukhlisa, S.E., Selfia Orita, S.Si., Kisman, S.Kom, Niko Zaiyalisman yang selalu memberi semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat dan karunianya kepada kalian semua yang telah memberi bantuan kepada penulis. Akhir kata, semoga Skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan bagi yang membacanya.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 12 Desember 2019

Penulis

Lanteria Hardiyanti

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
BERITA ACARA UJIAN KONFEREHENSIF SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH	xvi
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	10
2.1 Studi Kepustakaan	10
1 Konsep Organisasi	10
2 Konsep Administrasi	12
3 Konsep Manajemen	15
4 Konsep MSDM	19
5 Konsep Evaluasi	21
6 Konsep Pelaksanaan	22
7 Konsep Pengawasan	22
8 Konsep Evaluasi Kebijakan	26
2.2 Kerangka Pikir	29
2.3 Konsep Operasional	30
2.4 Operasional Variabel	32
2.5 Teknik Pengukuran	33

BAB III METODE PENELITIAN	34
3.1 Tipe Penelitian	34
3.2 Lokasi Penelitian	34
3.3 Populasi dan Sampel.....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data.....	39
3.5 Teknik Pengumpulan Data	40
3.6 Teknik Analisis Data	41
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	43
4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi	43
1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi	43
2 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	44
3 Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi	46
4 Kondisi Demografi Kabupaten Kuantan Singingi	47
5 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi	48
6 Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi	50
4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	51
1 visi dan Misi Dinas	51
2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas	52
3 Susunan Organisasi Dinas	53
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	59
5.1 Identitas Responden.....	59
5.2 Hasil Pembahasan Data Indikator Variabel Evaluasi Pelaksanaan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.....	62
2.1 Masukan (<i>Input</i>).....	62
2.3 Proses (<i>Process</i>).....	66
2.5 Keluaran (<i>Output</i>)	69
2.7 Dampak (<i>Outcome</i>).....	72
5.3 Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Indomaret	75
BAB VI PENUTUP.....	78

6.1 Kesimpulan	78
6.2 Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN.....	83



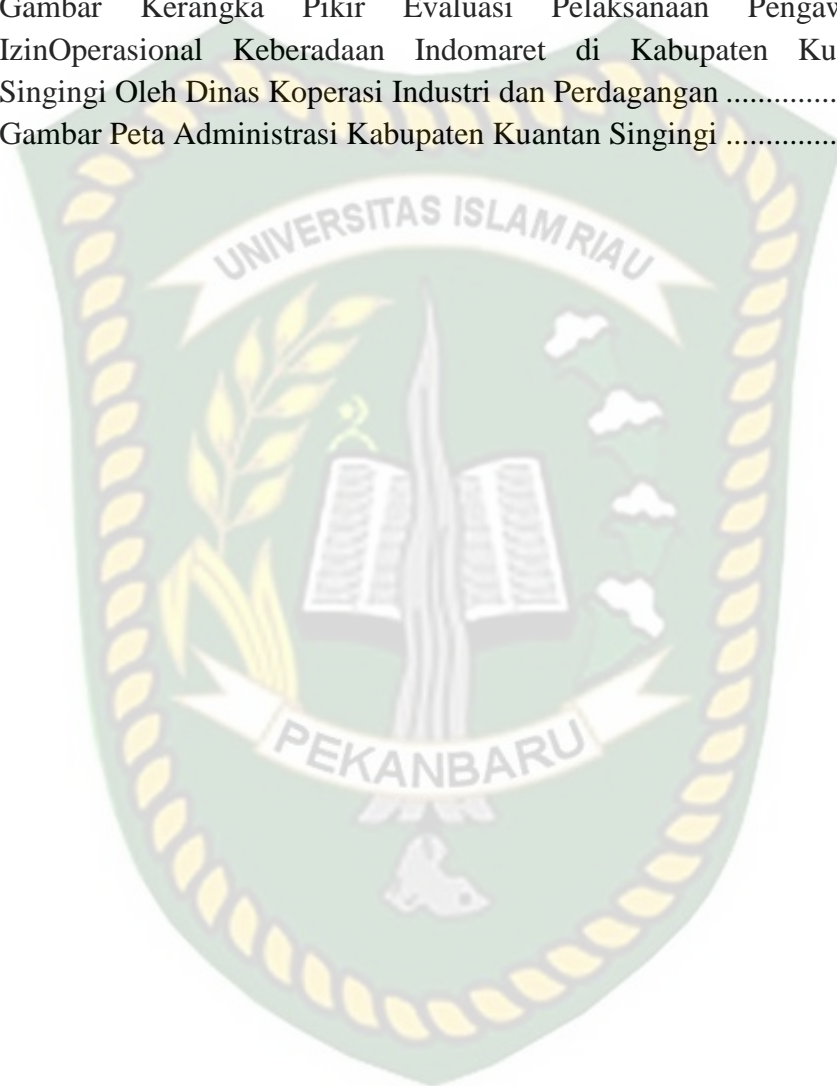
Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

Tabel		Halaman
1.1	Tabel Data Investasi Perdagangan di Pulau Sumatera pada Tahun 2015-2017.....	3
1.2	Tabel Data Investasi Perdagangan di Provinsi Riau pada Tahun 2015-2017	4
1.3	Tabel Fluktuaktif Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tahun	5
1.3	Tabel Jumlah Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2017	7
2.2	Tabel Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan.....	32
3.1	Tabel Jumlah Populasi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	35
3.2	Tabel Jumlah Populasi Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi.....	36
3.3	Tabel Jumlah Sampel Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	37
3.4	Tabel Jumlah Sampel Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi.....	38
4.1	Tabel Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa atau Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi.....	45
4.2	Tabel Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi	47
5.1	Tabel Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	59
5.2	Tabel Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	60
5.3	Tabel Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia.....	61
5.4	Tabel Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas KoperasiUKM Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Indikator <i>Input</i>	64
5.5	Tabel Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai DinasKoperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Terhadap Indikator <i>Process</i>	67
5.6	Tabel Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pelaku Usaha Indomaret Terhadap Indikator <i>Output</i>	70
5.7	Tabel Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pelaku Usaha Indomaret Terhadap Indikator <i>Outcome</i>	73
5.8	Tabel Rekapitulasi Jawaban Responden	76

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Gambar Kerangka Pikir Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan	30
4.1 Gambar Peta Administrasi Kabupaten Kuantan Singingi	44



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Daftar Kuesioner (untuk responden Pegawai) tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.....	83
2. Daftar Kuesioner (untuk responden Pelaku Usaha) tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.....	88
3. Daftar Pedoman wawancara penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	92
4. Rekap telly data penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	94
5. Photo Dokumentasi hasil observasi penelitian tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.....	99
6. SK Dekan Fisipol UIR No.647/UIR-Fs/Kpts/2017 tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi an. Lantera Hardiyanti.....	105
7. Surat Rekomendasi No.503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/18843 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi an. Lantera Hardiyanti	106
9. Surat Rekomendasi No.071/DPMPTSP-PTSP/2019/94 dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset/Pra Riset dan Pengumpulan Data Untuk Bahan Skripsi an. Lantera Hardiyanti.....	107
10. Surat Keterangan Penelitian No.132/SK/UM/III/2019 dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Tentang Penelitian dan Pengumpulan Data an Lantera Hardiyanti.....	108

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konverehensif Usulan Penelitian yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Lantera Hardiyanti
NPM : 147110482
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Janjang Pendidikan : Strata satu (S.1)
Judul Skripsi : Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian konverehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa, naskah usulan penelitian ini adalah benar hasil karya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu pada kaidah - kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah;
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administratif, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian konferehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta Hukum Negeri Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Desember 2019
Pelaku Pernyataan,

Lantera Hardiyanti

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Zulkifli (2014:9) Administrasi mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati. Peran administrasi sangat berhubungan erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan organisasi. Oleh karena itu, diperlukan wadah untuk menampung aspirasi kegiatan bagi penyelenggaraan aktivitas-aktivitas sumber daya manusia.

Menurut Siagian (2003:6) Organisasi adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama secara formal terikat dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan yang terdapat seseorang atau beberapa orang yang disebut atasan dan seorang atau kelompok orang yang disebut bawahan.

Agar keseluruhan aktivitas organisasi yang terjadi dalam suatu organisasi berjalan secara efektif dan efisien, maka dibutuhkan pengelolaan secara menyeluruh terhadap sumber daya yang dimiliki suatu organisasi. Aktivitas pengelolaan ini yang selanjutnya kita ketahui sebagai aktivitas manjerial dalam manajemen.

Manajemen adalah rangkaian aktivitas menggerakkan sekelompok orang dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen (dalam Wirman, 2012:12).

Sumber daya manusia merupakan modal dan kekayaan yang terpenting dari setiap kegiatan manusia. Manusia sebagai sumber unsur terpenting mutlak, dianalisis dan di kembangkan dengan cara tersebut, tenaga, waktu dan kemampuannya benar-benar dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan organisasi maupun bagi kepentingan individu. Manajemen sumber daya manusia itu sendiri merupakan suatu ilmu yang mempelajari khusus pada suatu unsur manajemen tersebut yaitu manusia.

Tanpa sumber daya manusia, maka sumber daya lainnya akan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan dari organisasi, maka untuk itu di perlukan manajemen sumber daya manusia sebagai pengantar bagaimana untuk menjalankan sebuah organisasi yang di bentuk dengan memanfaatkan sumber daya organisasi.

Menurut Hasibuan (2013:10), Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan, perusahaan, karyawan dan masyarakat. Salah satu kegiatan yang diterapkan dalam mencapai tujuan secara efektif dan efisien yaitu Evaluasi.

Menurut Zulkifli (2009:137), Evaluasi merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu.

Pelaksanaan merupakan fungsi manajemen yang sangat mendasar setelah adanya manusia dan organisasi, karena jika manusia yang ada didalam organisasi

tidak mampu menjalankan roda organisasi maka sama saja seperti sebuah kendaraan tidak bisa dijalankan

Menurut Siagian (2008:5) Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Provinsi Riau merupakan episentrum kegiatan perdagangan di Lintas Perekonomian Internasional berada di zona strategis Selat Melaka. Dengan memanfaatkan jalur perdagangan ini kekuatan investasi di sektor perdagangan menjadi daya tarik tersendiri.

Tingginya permintaan Investor untuk turut berinvestasi di Provinsi Riau di tunjukkan oleh Data Badan Pusat Statistik seperti di bawah ini.

Tabel 1.1 Data Investasi Perdagangan di Pulau Sumatera Pada Tahun 2015-2017

No	Provinsi	2015	2016	2017	Total
1	2	3	4	5	6
1	Riau	9,943.0	6,613.8	10,829.8	27,386.5
2	Sumatera Utara	4,287.4	4,864.2	11,683.6	20,835.2
3	Lampung	1,102.3	6,031.8	7,014.8	14,148.9
4	Jambi	3,540.2	3,884.4	3,006.6	10,431.2
5	Aceh	4,192.4	2,456.1	782.8	7,431.3
6	Sumatera Barat	1,552.5	3,795.6	1,517.0	6,865.1
7	Kepulauan Bangka Belitung	1,023.7	2,202.0	1,734.7	4,960.4
8	Kepulauan Riau	612.1	492.5	1,398.0	2,502.6
9	Bengkulu	553.9	949.1	296.5	1,799.5

Sumber : Badan Pusat Statistik.26 Juni 2018.Realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri Menurut Provinsi (Miliar Rupiah) 2006-2017.

Data tabel diatas, menjelaskan bahwa investasi perdagangan kawasan Sumatera berada di urutan pertama adalah Provinsi Riau dengan total 27,386.5 sepanjang tahun 2015, 2016 dan 2017. Sementara itu, Investasi terendah berdasarkan data statistik berada di Provinsi Bengkulu dengan total investasi sepanjang tahun 2015,2016 dan 2017 adalah 1,799.5.

**Tabel 1.2 Data Investasi Perdagangan di Provinsi Riau
Pada Tahun 2015-2017**

No.	Kabupaten/Kota	2015	2016	2017	Total
1	Pekanbaru	4,463.5	825.6	927.335	1,757.398.5
2	Dumai	1,707.7	5,563.5	2,007.203	9,278.403.8
3	Kampar	977.2	600.1	800.605.4	2,377.905.4
4	Pelalawan	823.3	3,704.6	672.913.1	1,499.917.7
5	Indragiri Hilir	528.9	372.7	1,140.402	902.830.4
6	Siak	527.6	4,974.1	547.627.4	1,080.201.5
7	Rokan Hulu	275.1	214.2	932.173.7	1,421.473.7
8	Kuantan Singingi	245.8	788.9	5,806.9	1,040.506.9
9	Bengkalis	205.1	515.6	3,108.122	723.808.1
10	Indragiri Hulu	188.6	888.0	687.465.2	1,764.065.2
11	Rokan Hilir	-	67.81	-	67.81
12	Kepulauan Meranti	-	-	160.9	160.90

Sumber :Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau.

Tabel diatas menjelaskan bahwa investasi perdagangan di Provinsi Riau di urutan pertama adalah Kota Dumai dengan total 9,278.403.8 sepanjang tahun 2015, 2016 dan 2017. Sementara itu, Investasi terendah Kabupaten Rokan Hilir dengan total investasi sepanjang tahun 2015,2016 dan 2017 adalah 67.81.

Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai investasi ritel francaise. Menurut Charles L. Vauhn *Franchise* merupakan bentuk kegiatan pemasaran dan distribusi yang di dalamnya sebuah perusahaan memberikan hak atau *priviledge* untuk menjalankan bisnis secara tertentu dalam waktu dan tempat tertentu kepada individu atau perusahaan yang relatif lebih kecil.

Toko Modern “Indomaret” sebanyak 9 titik di beberapa Kecamatan Seperti Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Singingi, dan Kecamatan Singingi Hilir. Adapun data yang di peroleh dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2 Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Berdasarkan Tahun

Tahun	Koridor Izin Usaha	Unit
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
2015	Kecamatan Kuantan Tengah Jl. Perintis	1
2016	Kecamatan Kuantan Tengah Jl. Imam Munandar	1
2017	- Kecamatan Kuantan Tengah Jl. Lintas Taluk Kuantan–Pekanbaru	1
	- Kecamatan Kuantan Hilir	1
	- Kecamatan Singingi Jl. Sudirman Muara Lembu	1
	- Kecamatan Singingi Hilir	2
2018	- Kecamatan Benai	1
	- Kecamatan Cerenti	1
	Jumlah	9

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

Jenis usaha dan Investasi, seperti Indomaret masuk di dalam kategori Toko Modern. Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern pada pasal 1 disebutkan:

1. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk grosir yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
2. Syarat perdagangan (*Trading Terms*) adalah syarat–syarat dalam perjanjian kerjasama antara pemasok dan Toko Modern/pengelolaan jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasokan produk–produk yang di perdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan.
3. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha

pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah daerah setempat.

Izin Operasional Usaha Perdagangan di atur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan pada bagian ke tujuh yaitu perizinan pada pasal 24:

1. Pelaku Usaha yang melakukan kegiatan usaha Perdagangan wajib memiliki perizinan di bidang Perdagangan yang diberikan oleh Menteri.
2. Menteri dapat melimpahkan atau mendelegasikan pemberian perizinan kepada Pemerintah Daerah atau instansi teknis tertentu.
3. Menteri dapat memberikan pengecualian terhadap kewajiban memiliki perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan di bidang Perdagangan sebagaimana pada ayat (1) dan pengecualiannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 112 tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar tradisional, Pusat Pembelanjaan dan toko-toko modern pasal 4 ayat 1 disebutkan Toko Modern wajib menghitung kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar serta jarak Toko Modern dengan Pasar Tradisional yang sudah ada.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi tentang Toko Modern belum ada maka Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan tidak bisa tegas dalam melakukan Pengawasan.

**Tabel 1.3 Jumlah Indomaret di Kabupaten
Kuantan Singingi Tahun 2016-2017**

No	Jenis Usaha	Koridor Izin Usaha	Unit	Perusahaan Pendiri Usaha
1	2	3	4	5
1	Indomaret	Kecamatan Kuantan Tengah	2	PT. Indomarco Prismatama
2	Indomaret	Kecamatan Kuantan Hilir	1	PT. Indomarco Prismatama
3	Indomaret	Kecamatan Singingi	2	PT. Indomarco Prismatama
4	Indomaret	Kecamatan Singingi Hilir	2	PT. Indomarco Prismatama
5	Indomaret	Kecamatan Benai	1	PT. Indomarco Prismatama
6	Indomaret	Kecamatan Cerenti	1	PT. Indomarco Prismatama
Jumlah			9	

Sumber : Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

Indomaret yang sudah terdaftar mempunyai izin operasional di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian hanya 7 ritel indomaret, namun ada 2 ritel Indomaret yang sudah beroperasi tapi belum memiliki surat izin.

Berdasarkan hasil observasi yang penulis lakukan, ternyata ada beberapa permasalahan yang terjadi dalam pengawasan izin operasional keberadaan indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Permasalahan-permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Belum ada Peraturan Daerah yang mengatur tentang Izin Operasional Toko Modern di Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Kurangnya Pengawasan dari Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kuantan Singingi sehingga Indomaret yang tidak memiliki SIUP dapat beroperasi. Padahal dalam proses SIUP Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan terlibat.

Evaluasi pelaksanaan pengawasan izin operasional Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian merupakan salah satu kegiatan atau tindakan dalam manajemen. Pengawasan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian tersebut bertujuan untuk :

1. Menertibkan Operasional Indomaret yang beroperasi tetapi belum memiliki izin operasional
2. Mengidentifikasi penyalahgunaan untuk menyelenggarakan usaha.
3. Melakukan pengawasan di lingkungan masyarakat setempat apakah masyarakat setempat yang sudah menyetujui dan menanda tangani didirikan indomaret di lingkungan mereka.

Diharapkan dengan adanya pengawasan tersebut tidak ada lagi ditemui Indomaret yang tidak memiliki surat izin usaha Perdagangan (SIUP). Karena apabila tidak dilakukan pengawasan terhadap Indomaret yang tidak memiliki SIUP maka akan semakin banyak di setiap daerah bahkan di suatu kecamatan bisa terdapat banyak Indomaret yang tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari fenomena yang telah dipaparkan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian serta mengangkat permasalahan tentang: **“Bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian“?**

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

2. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan ilmu administrasi, minimal dapat memperkaya hasil-hasil penelitian di bidang administrasi, khususnya dibidang Administrasi Publik.
2. Kegunaan Akademis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.
3. Guna Praktis, yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

2.1 Studi Kepustakaan

1. Konsep Organisasi

Organisasi merupakan unsur utama bagi kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah atau tempat pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas bagi pencapaian tujuan. (Wirman, 2012:12).

Menurut Max Weber, Organisasi merupakan suatu kerangka hubungan terstruktur yang didalamnya terdapat wewenang dan tanggung jawab serta pembagian kerja menjalankan suatu fungsi tertentu. (dalam Sugandi, 2011:26).

Menurut James Mooney, Organisasi adalah bentuk setiap kerjasama manusia untuk pencapaian tujuan bersama (dalam Supardi, 2002:4).

Menurut Chester I. Barnard, Organisasi adalah suatu sistem kegiatan kerjasama dari dua orang atau lebih, sesuatu yang tidak terwujud dan tidak bersifat perseorangan sebagian besar mengenai hal hubungan-hubungan (dalam Supardi, 2002:4).

Menurut John D. Millet, Organisasi adalah sebagai kerangka struktur dimana pekerjaan dari beberapa orang diselenggarakan untuk mewujudkan suatu tujuan bersama (dalam Syafiie, 2010:51).

Organisasi adalah sebagai bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama dan secara formal terikat dalam rangka pencapaian suatu tujuan yang telah ditentukan dalam ikatan mana terdapat seorang atau beberapa

orang yang disebut atasan atau sekelompok orang yang disebut bawahan. (dalam Siagian. 1986:7).

Menurut Massie (1964:64), Organisasi merupakan suatu kerjasama kelompok orang yang membagi tugas-tugasnya diantara para anggota, menetapkan hubungan-hubungan kerja dan menyatukan aktivitas-aktivitasnya kearah pencapaian tujuan bersama.

Menurut Herbert A. Simon, Organisasi sebagai pola komunikasi yang lengkap dan hubungan-hubungan lain di dalam suatu kelompok orang-orang (dalam Syafiie, 2010:51).

Organisasi adalah persekutuan atau perkumpulan orang-orang yang masing-masing diberi peranan tertentu dalam suatu sistem kerja dan pembagian kerja dimana pekerjaan (yang terdapat dalam organisasi tersebut) dipilah-pilah menjadi tugas dan dibagikan kepada para pelaksana tugas atau pemegang jabatan untuk mendapatkan satu kesatuan hasil (dalam Soffer, 1973:220).

Selain tersusun dari sekumpulan orang yang pekerjaannya dikoordinasikan secara sadar untuk mencapai tujuan tertentu, organisasi pun melibatkan berbagai sumber daya organisasi seperti modal, material, mesin-mesin, dan teknologi yang juga dikoordinasikan penggunaannya agar dapat mencapai tujuan organisasi. Memberikan penekanan yang lebih besar kepada unsur manusia dalam mengembangkan definisi organisasi karena manusia merupakan satu-satunya sumber daya organisasi yang mampu mengkoordinasikan seluruh sumber daya organisasi yang lain.

Menurut Dwight Waldo, Organisasi adalah sebagai suatu struktur dari kewenangan-kewenangan dan kebiasaan-kebiasaan dalam hubungan antara orang-orang pada suatu sistem administrasi (dalam Syafiie, 2010:52).

2. Konsep Administrasi

Menurut Prajudi Atmosudirdjo, Administrasi merupakan suatu fenomena sosial, suatu perwujudan tertentu di dalam masyarakat modern. Eksistensi daripada administrasi ini berkaitan dengan organisasi, artinya administrasi itu terdapat didalam suatu organisasi. jadi barang siapa hendak mengetahui adanya administrasi dalam masyarakat ia harus mencari terlebih dahulu suatu organisasi yang masih hidup, disitu terdapat administrasi (dalam Syafiie, 2010:13).

Menurut John M. Pfiffner dan Robert, Administrasi adalah suatu proses umum yang menandai (merupakan karakteristik) semua usaha bersama (dalam Wirman, 1960:8).

Menurut Ordway Tead, Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat eksekutif dalam suatu organisasi, yang bertugas mengatur, memajukan dan melengkapai usaha kerja sama sekumpulan orang yang sengaja dihimpun untuk mencapai tujuan tertentu (dalam Miftah Thoha, 1990:11).

Menurut Herbert A. Simon, Menyatakan sebagai berikut *“In its broadest sense, administration can be defined as the activities of group cooperating to accomplish common goals”*. Artinya Dalam pengertian yang terluas, administrasi dapat dirumuskan sebagai kegiatan dari kelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama (dalam Miftah Thoha, 1990:11)

Menurut The Liang Gie, Administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan dalam setiap usaha kerja sama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu.(dalam Miftah Thoha, 1990:12).

Kesimpulan yang dapat di tarik dari definisi ini yaitu antara lain :

1. Administrasi merupakan proses kerja sama
2. Proses kerja sama tersebut dilakukan oleh sekelompok orang secara rasional
3. Dan kerja sama tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan tertentu.

Menurut Nawawi, Administrasi adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan sebagai proses pengendalian usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan sebelumnya (dalam Syafie, 2010:14)

Menurut Leonard D. White, “*Administrasion is a process common to all group effort, publik or private, civil or military, large scale or small scale*”. Administrasi adalah proses yang selalu terdapat pada setiap usaha kelompok, publik atau privat, sipil atau militer, skala besar atau kecil”.Pendapat ini menunjukkan bahwa administrasi adalah suatu proses rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang memiliki tujuan yang hendak di capai sesuai dengan yang dikehendaki (dalam Wirman, 1958:9).

Menurut Sondang P. Siagian, Administrasi adalah keseluruhan proses kerja sama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Wirman, 2008:9).

Menurut Zulkifli (2014:9), Administrasi sebagai salah satu cabang ilmu sosial, definisinya tidak terbatas hanya sekedar pekerjaan yang berkenaan dengan ketatausahaan dari suatu organisasi. administrasi dalam arti luas mencakup keseluruhan proses aktivitas kerjasama sejumlah manusia di dalam organisasi untuk mencapai satu atau sejumlah tujuan yang telah disepakati sebelumnya.

Menurut Silalahi (1992:11), Administrasi adalah kerjasama yang dilakukan sekelompok orang berdasarkan pembagian kerja sebagaimana ditentukan dalam struktur dengan mendayagunakan sumber daya-sumber daya untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

Menurut Silalahi (1992:11), Terdapat tiga pengertian substansial yang terkandung dalam sejumlah definisi konsep administrasi tersebut.

1. Bahwa administrasi dapat dipandang sebagai seni. Keberhasilan penerapannya memerlukan kiat-kiat tertentu yang bersifat sangat situasional dan kondisional. Administrasi sangat terikat kepada aspek kondisi, situasi, waktu dan tempat dimana dia dijalankan.
2. Bahwa didalam konsep administrasi terdapat unsur-unsur, adanya dua orang manusia atau lebih, adanya tujuan yang hendak dicapai, adanya tugas-tugas yang harus dilaksanakan, adanya perlengkapan dan peralatan untuk melaksanakan tugas, dan adanya pertimbangan rasionalitas dalam merumuskan dan menyediakan setiap unsur tersebut diatas.
3. Bahwa administrasi sebagai suatu proses kerjasama bukan merupakan konsep yang baru. Dia sudah ada dan dijalankan sejak manusia mengenal peradaban.

Dalam aspek ilmu administrasi publik ada prinsip-prinsip umum yang harus dipahami dan di implementasikan oleh para administrator. Menurut Henry Fayol (dalam Wirman,2012:156) merumuskan 14 prinsip administrasi :

1. *Division of work*: Pembagian tugas pekerjaan atau spesialisasi. Prinsip ini merupakan upaya yang harus dipertimbangkan untuk mendapatkan efisiensi dalam menggunakan tenaga kerja.

2. *Authority dan responsibility*: harus ada kaitan dan hubungan antara wewenang dan tanggung jawab. Tanggung jawab merupakan akibat yang timbul dari adanya wewenang. Wewenang sebagai suatu kombinasi antara wewenang resmi yang timbul sebagai akibat kedudukan resmi seorang manajer dan wewenang yang bersifat pribadi yang merupakan gabungan dari intelegensia, pengalaman, nilai-nilai moral, pekerjaan masa lampau, dan sebagainya.
3. *Discipline*: Disiplin berarti sikap dan perilaku yang selalu sesuai konsekuen, tidak hanya sesuai dengan norma-norma yang berlaku, tetapi juga dengan nilai-nilai yang ingin dicapai. Dengan sikap disiplin akan dapat menjamin tercapainya tujuan.
4. *Unity of command*: Kesatuan komando (perintah) dengan kesatuan komando akan tercapai kesatuan bahasa, kesatuan arah dan kesatuan tujuan karena seorang pegawai menerima perintah dari seorang atasannya.
5. *Unity of direction*: setiap kelompok dari kegiatan-kegiatan yang tujuannya sama harus mempunyai satu pimpinan dan kesatuan arah tujuan yang sama.
6. *Subordination of individual interest to the general interest*: mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan.
7. *Remuneration (Penggajian)*: pemberian ganjaran sebagai balas jasa, sebagai alat motivasi dan pendorong.
8. *Centralization*: sentralisasi, penugasan wewenang yang dimiliki.
9. *Scalar chain / jenjang hierarki* : tingkat wewenang yang dimiliki.
- 10 *Order*: Ketertiban.
11. *Equity*: pelaksanaan yang adil pada semua pihak.
12. *Stability of tenure of personnel*: stabilitas jabatan karyawan.
13. *Initiative*: daya prakarsa, terutama prakarsa dalam mencapai langkah-langkah yang tepat dan jitu dalam mencapai tujuan.
14. *Esprit de corps*: semangat persatuan dalam korps.

3. Konsep Manajemen

Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu.

Manajemen adalah proses pencapaian tujuan melalui orang lain. Oleh sebab itu, manajemen merupakan rangkaian aktivitas menggerakkan sekelompok orang

dalam organisasi untuk mencapai tujuan melalui pelaksanaan fungsi–fungsi manajemen. Organisasi baru akan bermakna jika telah berlangsung proses manajemen (dalam Wirman, 2012:12).

Menurut Stoner (1996:7), Manajemen merupakan proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan pekerjaan anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai sasaran organisasi yang sudah di tetapkan.

Menurut Shafritz dan Russel Manajemen adalah berkenaan dengan orang yang bertanggung jawab menjalankan suatu organisasi, dan proses menjalankan organisasi itu sendiri yaitu pemanfaatan sumber daya seperti orang dan mesin untuk mencapai tujuan organisasi (dalam Harbani Pasolong,2011:82).

Menurut Donovan dan Jackson, Manajemen sebagai proses yang dilaksanakan pada tingkat organisasi tertentu, sebagai rangkaian keterampilan (*skill*) dan sebagai rangkaian tugas (dalam Harbani, 2011:82).

Menurut Henry Simamora, Manajemen adalah proses pendayagunaan bahan baku dan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan (dalam Harbani, 2011:83).

Menurut John D. Millet, Manajemen adalah proses kepemimpinan dan pemberian arah terhadap pekerjaan yang terorganisasi dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan yang dikehendaki (dalam Syafiie, 2010:49).

Menurut Ordway Tead, Manajemen adalah proses dan perangkat yang mengarahkan serta membimbing kegiatan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan (dalam Syafiie, 2010:49).

Menurut Ralph C. Davis, *management is the function of the executive leadership anywhere*. Maksudnya, Manajemen adalah fungsi dari setiap pemimpin pemerintahan dimanapun berada (dalam Syafiie, 2010:49).

Menurut Prajudi, Manajemen adalah pengendalian dan pemanfaatan dari semua faktor serta sumber daya yang menurut suatu perencanaan, diperlukan untuk mencapai atau menyelesaikan suatu prapta atau tujuan kerja yang tertentu (dalam Syafiie, 2010:49).

Menurut The Liang Gie (1993:14), Manajemen merupakan rangkaian kegiatan penataan yang berupa penggerakkan orang-orang dan penggerakkan fasilitas kerja agar tujuan kerjasama benar-benar tercapai. Dia juga mengemukakan bahwa manajemen sebagai suatu proses memiliki enam fungsi utama yaitu: perencanaan, pembuatan keputusan, pengarahan, pengkoordinasian, pengontrolan, dan penyempurnaan.

Menurut George R. Terry, Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan *planing, organizing, actuating, dan controlling* dimana pada masing-masing bidang digunakan baik ilmu pengetahuan maupun keahlian dan diikuti secara beruntun dalam rangka usaha mencapai sasaran yang telah ditetapkan semula (dalam Sarwanto,1983:46).

Teoritas aspek-aspek Studi Manajemen:

1. *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah proses menetapkan sasaran dan tindakan yang perlu untuk mencapai sasaran atau tujuan. Peranan dalam semua kegiatan yang bersifat manajerial untuk mendukung usaha-usaha pencapaian tujuan.

Fungsi perencanaan haruslah dilakukan terlebih dahulu dari pada fungsi pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan.

2. *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah setiap bentuk persekutuan antara dua orang atau lebih yang bekerja sama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan yang mana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan sekelompok orang yang disebut bawahan.

3. *Actuating* (Penggerakan)

Penggerakan adalah proses pemberian dorongan bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapai tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis.

4. *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber daya lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu (dalam Hasibuan, 2010:10).

4. Konsep Manajemen Sumber Daya Manusia

Menurut A.F. Stoner, Manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi yang memerlukannya (dalam Nabila,2013:6).

Menurut Melayu SP. Hasibuan (2003:10), Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan , karyawan dan masyarakat.

Menurut Mutiara S. Panggabean (2004:15),Manajemen sumber daya manusia adalah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pimpinan dan pengendalian kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan analisis pekerjaan, evaluasi pekerjaan, pengadaan, pengembangan, kompensasi, promosi dan pemutusan hubungan kerja guna mencapai tujuan yang telah di tetapkan.

Menurut Hasibuan (2013:10), Manajemen sumber daya manusia adalah ilmu seni mengatur hubungan dan peranan tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan, perusahaan, karyawan dan masyarakat.

Fungsi manajemen sumber daya manusia yang dikemukakan oleh Hasibuan (2013:21-23) antara lain sebagai berikut:

1. Perencanaan
2. Pengorganisasian
3. Pengarahan
4. Pengendalian
5. Pengadaan
6. Pengembangan

7. Kompensasi
8. Pengintegrasian
9. Pemeliharaan
10. Kedisiplinan
11. Pemberhentian

Manajemen sumber daya manusia bisa di definisikan sebagai proses serta upaya untuk merekrut, mengembangkan, memotivasi, serta mengevaluasi keseluruhan sumber daya manusia di bagi kedalam lima bagian fungsi utama yang terdiri dari:

1. *Human resource planning*, merencanakan kebutuhan dan pemanfaatan sumber daya manusia bagi perusahaan.
2. *Personal procurement*, mencari dan mendapatkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya rekrutmen, seleksi dan penempatan serta kontrak tenaga kerja.
3. *Personal development*, mengembangkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya program orientasi tenaga kerja, pendidikan dan pelatihan.
4. *Personal maintenance*, memelihara sumber daya manusia, termasuk di dalamnya pemberian penghargaan, insentif, jaminan kesehatan, dan keselamatan kerja, dan lain sebagainya.
5. *Personal utilization*, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya manusia, termasuk di dalamnya promosi, demosi, transfer, dan juga separasi.

Menurut Amirullah (2004:206), Manajemen sumber daya manusia merupakan kegiatan yang mengatur tentang cara pengadaan tenaga kerja, melakukan pengembangan, memberikan kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemisahan tenaga kerja melalui proses-proses manajemen dalam rangka mencapai tujuan organisasi.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu sumber daya organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dalam kegiatan organisasi guna mencapai tujuan-tujuan organisasi.

5. Konsep Evaluasi

Menurut Nurcholis (2007:277) Evaluasi merupakan suatu proses yang mendasarkan diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Menurut Ndraha (2003:201) Evaluasi adalah proses perbandingan antara perbandingan dengan fakta dan analisis hasilnya. Selanjutnya menurut Ndraha (2003:202) ada berbagai model evaluasi, tiga diantaranya sebagai berikut:

1. *Model Before-after*, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakuan). Tolak ukurnya adalah *Before*.
2. *Model Das Sollen-Das Sein*, yaitu perbandingan antara seharusnya dengan kenyataannya tolak ukurnya adalah *Das Sollen*.
3. *Model kelompok Kontrol-Kelompok tes*, yaitu perbandingan antara kelompok control (tanpa perlakuan) dengan kelompok tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah *kelompok control*.

Menurut Lester dan Stewart, Evaluasi ditujukan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan akan untuk mengetahui apakah kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan (dalam Gomes, 2006:185).

Menurut Wirawan (2012:7), Evaluasi dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, selanjutnya menilainya dan membandingkannya dengan indikator evaluasi dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi tersebut.

Menurut Zulkifli (2009:137), Evaluasi (penilaian) merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu.

Dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Evaluasi yaitu penilaian dan merupakan bagian yang integral dari proses pelaksanaan sistem pengawasan. Penilaian merupakan suatu proses analisis data yang diperoleh melalui proses pengawasan untuk menentukan hasil factual dari pelaksanaan pengawasan itu. Jika demikian halnya perbedaan mendasar antara pengawasan dengan penilaian terletak pada aspek orientasi waktu, sasaran, dan pemanfaatan.

6. Konsep Pelaksanaan

Menurut Syauckani(2002:293), Pelaksanaan merupakan suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup, **pertama** persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut, **kedua** menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk didalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan dan tentu saja penetapan siapa yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, ketiga bagaimana menghantarkan kebijaksanaan secara kongkrit kemasyarakat.

7. Konsep Pengawasan

Menurut Siagian Pengawasan di definisikan sebagai proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua

pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya (dalam Sujamto,1986:15).

Menurut Sarwoto Pengawasan adalah kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan atau hasil yang dikehendaki (dalam Sujamto,1986:16).

Menurut Soekarno K. Pengawasan adalah suatu proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. (dalam Sujamto,1986:17).

Menurut George R. Terry Pengawasan adalah untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan koreksi, bila diperlukan, untuk menjamin agar hasilnya sesuai dengan rencana. (dalam Sujamto,1986:18).

Menurut Henry Fayol Pengawasan terdiri dari pengujian apakah segala sesuatu berlangsung sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dengan instruksi yang telah diberikan dan dengan prinsip-prinsip yang telah digariskan. Ia bertujuan untuk menunjukkan kelemahan-kelemahan dan kesalahan-kesalahan dengan maksud untuk memperbaikinya dan mencegah terulangnya kembali (dalam Sujamto,1986:18).

Menurut Lyndall F. Urwick, Pengawasan adalah upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan dan instruksi yang telah dikeluarkan (dalam Syafie,2010:82).

Menurut Henry Fayol, Pengawasan adalah ketepatan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan, yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan,

yang sudah tidak dapat di pungkiri lagi. Pengawasan merupakan kewajiban setiap orang dalam organisasi secara terus menerus, memperhatikan dan mengawasi jalannya tugas masing-masing bidang sesuai rencana semula (dalam Syafiie, 2010:82).

Menurut Sondang P. Siagian, Pengawasan adalah proses pengamatan dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah di tentukan sebelumnya (dalam Syafiie, 2010:82).

Menurut George Terry, Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran) (dalam Syafiie,2010:82).

Menurut Prof. Stephen Robein, Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses mengikuti perkembangan kegiatan untuk menjamin (*to ensure*) jalannya pekerjaan, dengan demikian dapat selesai secara sempurna (*accomplished*) sebagaimana yang direncanakan sebelumnya dengan pengoreksian beberapa pemikiran yang saling berhubungan (dalam Syafiie, 2010:83).

Menurut Terry (1990:166) Pengawasan adalah kegiatan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan bila perlu memperbaiki tindakan yang telah dilaksanakan untuk mendapatkan kepastian mencapai hasil yang direncanakan.

Berdasarkan deskripsi beberapa batasan pengawasan diatas, terlihat bahwa fungsi manajemen yang satu ini sebagai proses merupakan suatu sistem yang

terdiri dari beberapa tahap kegiatan. Tahap-tahap kegiatan dimaksud dilaksanakan dengan mengembangkan teori sistem. Artinya seluruh kegiatan itu walaupun dapat dibedakan jenis dan bentuk teknisnya namun pelaksanaannya merupakan suatu rangkaian yang utuh, saling interdependensi antar sesamanya.

Tahapan atau langkah-langkah pelaksanaan pengawasan yang lebih terperinci dikemukakan oleh Terry (1990:167-169) sebagai berikut:

1. Menetapkan standar
2. Menetapkan pelaksanaan kegiatan pengawasan
3. Mengadakan perbandingan terhadap pelaksanaan kegiatan
4. Koreksi, penyesuaian kegiatan operasional supaya mencapai hasil yang sama seperti yang direncanakan.

Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan. (dalam Handoko,2012:359).

Ada tiga tipe pengawasan (Handoko,2012:360) yaitu :

1. Pengawasan pendahuluan (*feedforward control*)
Pengawasan pendahuluan dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan.
2. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan (*concurrent control*)
Pengawasan concurrent dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Dimana aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, syarat tertentu harus dipenuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau menjadi semacam peralatan "*double-check*" yang lebih menjamin ketetapan pelaksanaan suatu kegiatan.
3. Pengawasan umpan balik (*feedback control*)
Pengawasan umpan balik mengukur hasil dari suatu kegiatan yang telah diselesaikan.

Menurut Robert Kreitner (dalam Harahap,1996:305) karakteristik dari sistem pengawasan yang efektif meliputi:

1. Integrasi. Pengawasan harus terintegrasi dengan keseluruhan sistem organisasi atau built in control.
2. Tepat waktu. Informasi yang dilibatkan kepada sistem kontrol harus tepat waktu.
3. Obyektif. Sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang obyektif.
4. Akurat. Sistem pengawasan harus menggunakan dan memberikan informasi yang akurat.
5. Fleksibel. Sistem pengawasan harus fleksibel sehingga dapat mengakomodasi perubahan-perubahan dan penyesuaian.

8. Konsep Evaluasi Kebijakan

Untuk menentukan keberhasilan sebuah kebijakan maka perlu dilakukan penilaian dari sebuah kebijakan yang telah diimplementasikan oleh unit pelaksana kebijakan.

Evaluasi kebijakan adalah penilaian secara menyeluruh Input, Proses, Output, dan Outcome dari kebijakan pemerintah daerah. Evaluasi memiliki 4 tipe menurut Badjuri dan Yuwono (dalam Nurcholis, 2007:276).

1. Evaluasi Kecocokan
2. Evaluasi Efektivitas
3. Evaluasi Efesiens
4. Evaluasi Meta

Menurut Abidin (2006;211) mengemukakan bahwa evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut:

1. Evaluasi awal, yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau *monitoring*.
3. Evaluasi akhir, yaitu dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan.

Menurut Suchman, Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang menyangkut estimasi atau penilaian kebijakan yang mencangjup subsidi, implementasi dan dampak(dalam Winarno, 2012:229).

Menurut Winarno (2012:230) menyatakan terdapat beberapa tipe evaluasi kebijakan antara lain :

1. Evaluasi kebijakan sebagai fungsional
2. Tipe evaluasi yang memfokuskan pada kebijakan tertentu
3. Tipe evaluasi kebijakan sistematis

Menurut Badjuri dan Yuwono (2002), Evaluasi kebijakan adalah yang meliputi pencapaian tujuan dan akuntabilitas kebijakan yang telah di implementasikan, serta memberikan masukan terhadap kebijakan public yang akan datang.

Menurut Bridgman & Davis mengacu pada empat indikator pokok yaitu *input, process, output dan outcome*(dalam Yuwono, 2002:140-141).

Masing-masing indicator tersebut akan dijelaskan berikut ini :

1. *Input*(masukan)

Indikator *Input* memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan.Indikator ini terdiri atas sumber daya manusia, uang, atau infrastruktur pendukung lainnya.

- a. Sumber daya pendukung
- b. Sarana pendukung

2. *Process* (proses)

Indikator *Process* memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan ditransformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini terdiri atas aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan public tertentu.

- a. Prosedur dan mekanisme
- b. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas

3. *Output* (hasil)

Indikator *Output* memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari system atau proses kebijakan public. Indikator hasil ini misalnya berapa orang yang berhasil mengikuti program tertentu.

- a. Hasil atau produk yang dihasilkan dalam pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Industri dan perdagangan
- b. Tingkat pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

4. *Outcome* (dampak)

Indikator *Outcome* memfokuskan diri pada pertanyaan dampak yang diterima oleh masyarakat luas atau pihak yang terkena kebijakan. Apakah kerusakan lingkungan dapat diminimalisasi dalam jangka lama?

- a. Dampak yang diterima oleh masyarakat luas atas pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan.

Dari beberapa defenisi menurut para ahli maka dapat disimpulkan bahwa evaluasi kebijakan merupakan proses penilaian suatu kebijakan mencakup substansi, implementasi, dan dampak dalam suatu program.

2.2 Kerangka Pikir

Kerangka pikir ini bertujuan untuk membentuk, menjelaskan pikiran dan konsep dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi yang berhubungan dengan penelitian ini, dengan memaparkan keterkaitan antara variabel penelitian yaitu menyampaikan sistem evaluasi yang berproses dalam satu jaringan kesatuan tidak terpisahkan.

Berdasarkan indikator dari penelitian maka peneliti menggambarkan kerangka pikir dengan indikator sistem evaluasi yang terintegrasi diantara *Input*, *Process*, *Output*, *Outcome* dapat dijelaskan dalam kerangka pikir dibawah ini.

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.



Sumber : Hasil Modifikasi Peneliti, Tahun 2019

2.3 Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan untuk memberikan gambaran dalam bentuk nyata dari konsep teori agar mudah di pahami dan dapat diukur sesuai dengan realita.

Untuk menjelaskan variabel dalam penelitian ini, maka perlu peneliti menyusun konsep operasional sebagai berikut :

1. Administrasi adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang manusia atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.
2. Organisasi adalah unsur utama bagi kelompok orang yang bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu karena organisasi merupakan wadah (tempat) pengelompokan orang dan pembagian tugas sekaligus tempat berlangsungnya berbagai aktivitas (proses) bagi pencapaian tujuan.
3. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk melakukan tindakan guna mencapai tujuan.

4. Pengawasan didefinisikan sebagai kebijakan manajerial dan operasional yang bertujuan agar pelaksanaan seluruh bidang kegiatan utama dan uraian tugas sesuai dengan rencana atau standar yang telah ditetapkan.
5. Kebijakan adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah.
6. Evaluasi adalah proses untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan secara menyeluruh dari suatu kebijakan, mulai dari awal sebuah kebijakan dibuat sampai akhir dari kebijakan tersebut dilaksanakan.
7. Pelaksanaan adalah suatu rangkaian aktivitas dalam rangka menghantarkan kebijakan masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana diharapkan.
8. Izin operasional adalah bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang yaitu Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha oleh pengusaha atau suatu perusahaan yaitu PT. Indomarco Prisamatama di Kabupaten Kuantan Singingi.
9. Sistem Evaluasi adalah suatu proses sistematis menetapkan nilai tentang sesuatu hal, seperti objek, proses, unjuk kerja, kegiatan, hasil, tujuan atau hal lain berdasarkan kriteria tertentu melalui penilaian.

2.4 Operasional Variabel

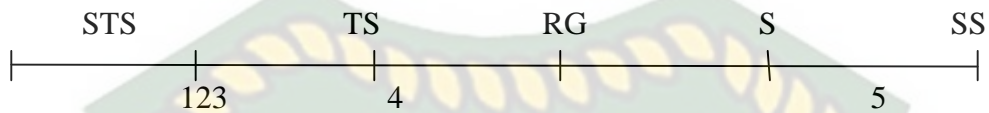
Tabel 2.1 Konsep Operasional Variabel Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Evaluasi kebijakan dapat dikatakan sebagai kegiatan yang mengukur estimasi atau penilaian kebijakan yang mencakup substansi, implementasi dan dampak. (Winarno, 2012: 229)	Evaluasi pelaksanaan pengawasan izin operasional Indomaret	1. <i>Input</i> (Masukan)	a. Sumber daya pendukung b. Sarana pendukung	Likert
		2. <i>Process</i> (Proses)	a. Prosedur dan mekanisme b. Efektivitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas	Likert
		3. <i>Output</i> (Hasil)	a. Hasil pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Industri dan perdagangan b. Tingkat pencapaian tujuan dari pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan	Likert
		4. <i>Outcome</i> (Dampak) (Badjuri dan Yuwono, 2002: 140-141).	a. Pengaruh terhadap target sasaran b. Dampak Luas	Likert

Sumber : Hasil Modifikasi Peneliti tahun 2018

2.5 Teknik Pengukuran

Pembuatan Kuesioner dipakai metode likert, dimana skala likert menggunakan skala ordinal dengan memberikan 5 tingkatan jawaban pilihan.



Menurut Sugiyono (2010;93), Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.

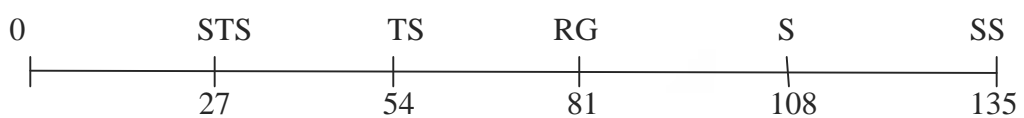
Pemilihan Skala Likert didasarkan atas aplikasi skala likert yang sangat mudah di implementasikan. Dari 5 tingkatan jawaban dari responden dapat di kelompokkan menjadi 5 interval kelas yaitu dengan rumus.

$$\begin{aligned} \text{Interval Kelas} &= \frac{\text{Nilai Tertinggi} - \text{Nilai Terendah}}{\text{Jumlah Kelas}} \\ &= \frac{(5-1)}{5} \\ &= 0,8 \end{aligned}$$

Skala Interval Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi.



Skala Interval untuk Pelaku Usaha Indomaret



METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah *Tipe Deskriptif* yaitu penyelidikan yang dilakukan terhadap variabel mandiri atau satu variabel, yaitu tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Kuantitatif dan Kualitatif. Metode ini yaitu penelitian yang menggunakan data angka-angka serta selanjutnya dianalisa lebih lanjut secara deskriptif (Sugiyono,2010:07).

Menurut Sugiyono (2012:137) berdasarkan teknik pengumpulan data penelitian kuantitatif dapat dilakukan dengan cara *Interview* (Wawancara), *Kuesioner* (Angket), dan Observasi.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi. Lokasi di Jalan Patimura Kompleks Perkantoran Pemda Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian ini sudah saya lakukan prasurvei pada tanggal 24 Agustus 2017.

Alasan peneliti melakukan penelitian di Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi adanya fenomena makanya keberadaan indomaret tidak di dukung oleh peraturan.

3.3 Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. (Sugiyono,2012;90).

Tabel 3.1 Jumlah Populasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Identitas Sub Populasi	Populasi	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan	1	3%
2	Sekretaris	1	3%
3	Sub. Bagian Umum	3	11%
4	Sub Bagian Program dan Keuangan	3	11%
5	Kepala Bidang Koperasi	1	3%
6	Seksi Koperasi	2	7%
7	Seksi UMKM	2	7%
8	Seksi Pengawasan Koperasi	2	7%
9	Kepala Bidang Perindustrian	1	3%
10	Seksi Bina Usaha Industri	2	7%
11	Seksi Pengembangan Permodalan dan Kerjasama	2	7%
12	Seksi Pengawasan Industri	2	7%
13	Kepala Bidang Perdagangan	1	3%
14	Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Perdagangan	2	7%
15	Seksi Informasi Pasar, Promosi dan Penataan Perdagangan	2	7%
16	Seksi Pengawasan Perdagangan	2	7%
<i>Jumlah</i>		29	100%

Sumber : Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

Jumlah populasi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 29 Orang, terdiri dari 1 Orang Kepala Dinas, 1 Orang Sekretaris, 3 Orang Sub Bagian Umum, 3 Orang Sub Bagian Program dan Keuangan, 1 Orang Kepala Bagian Koperasi dan 6 Orang Seksi-Seksi Koperasi, 1 Orang Kepala Bagian Perindustrian dan 6 Orang Seksi-seksi Perindustrian, 1 Orang Kepala Bagian Perdagangan dan 6 Orang Seksi Bagian Perdagangan.

Tabel 3.2 Jumlah Populasi Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi

Identitas Sub Populasi	Populasi (Perusahaan)	Alamat	Persentase (%)
Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah	1.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Perintis Kemerdekaan	11%
	2.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Imam Munandar	11%
	3.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	11%
Indomaret di Kecamatan Singingi	4.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	11%
Indomaret di Kecamatan Singingi Hilir	5.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	11%
	6.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	11%
Indomaret di Kecamatan Benai	7.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan – Air Molek	11%
Indomaret di Kecamatan Kuantan Hilir	8.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan – Air Molek	11%
Indomaret di Kecamatan Cerenti	9.PT. Indomarco Prismatama	Jl. Lintas Taluk Kuantan – Air Molek	11%
Jumlah	9		100%

Sumber : Data Olahan Peneliti

Jumlah Populasi Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 9 unit ruko, terdiri dari 3 unit ruko Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah, 1 unit ruko Indomaret di Kecamatan Singingi, 2 unit ruko Indomaret Kecamatan di Singingi Hilir, 1 unit ruko Indomaret di Kecamatan Benai, 1 unit ruko Indomaret di Kecamatan Kuantan Hilir dan 1 unit ruko Indomaret di Kecamatan Cerenti.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena

keterbatasan waktu, biaya, dan tenaga maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. (Sugiyono,2012:91).

Dari populasi yang berbeda, maka Sampel dibagi menjadi dua wilayah tiap-tiap bagian yaitu internal dan eksternal dengan tujuan agar dapat mewakili masing-masing populasi.

Tabel 3.3Jumlah Sampel Penelitian Pada Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan

No	Identitas Sampel	Sampel	Persentase (%)
1	Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian	1	3%
2	Sekretaris	1	3%
3	Kepala Bidang Perdagangan	1	3%
4	Seksi Pengawasan Perdagangan	2	7%
<i>Jumlah</i>		5	16%

Sumber : Data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Teknik penarikan sampel untuk Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian menggunakan *teknik Random Sampling*. *Random sampling* menurut Sugiyono(2001,57) adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu.Diketahui bahwa institusi yang mempunyai wewenang dalam melaksanakan pengawasan izin operasional Indomaret merupakan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Untuk kantor Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan di tentukan sampel, pada unit yang relevan bagi menjawab fenomena penelitian yaitu terdiri dari Kepala Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan sebanyak 1 Orang, Sekretaris 1 Orang, Kepala Bidang Perdagangan 1 Orang, dan Seksi Pengawasan Perdagangan Sebanyak 2 Orang.

Tabel 3.4 Jumlah Sampel Penelitian Pada Indomaret Kabupaten Kuantan Singingi

Identitas Sampel	Alamat	Sampel	Persentase (%)
Indomaret di Kecamatan Kuantan Tengah	Jl. Perintis Kemerdekaan	1	11%
	Jl. Imam Munandar	1	11%
	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	1	11%
Indomaret di Kecamatan Singingi	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	1	11%
Indomaret di Kecamatan Singingi Hilir	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	1	11%
	Jl. Lintas Taluk Kuantan - Pekanbaru	1	11%
Indomaret di Kecamatan Benai	Jl. Lintas Taluk Kuantan – Air Molek	1	11%
Indomaret di Kecamatan Kuantan Hilir	Jl. Lintas Taluk Kuantan – Air Molek	1	11%
Indomaret di Kecamatan Cerenti	Jl. Lintas Taluk Kuantan – Air Molek	1	11%
Jumlah		9	100%

sumber : Data Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Identifikasi sampel eksternal ditujukan kepada masing-masing indomaret yang berada di Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 9 unit perusahaan diwakili oleh pemilik perusahaan. Penelitian yang dijalankan dalam teknik penarikan sampel menggunakan sampling jenuh. Menurut Sugiyono(2013:126) menyatakan bahwa sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Berdasarkan sebaran sampel yang ada di wilayah Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 9 unit ruko Indomaret masing-masing tersebut dijelaskan dengan rincian 1 unit ruko Indomaret di Jl. Perintis Kemerdekaan dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Imam Munandar dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru dengan sumber

sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Pekanbaru dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Air Molek dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Air Molek dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan, 1 unit ruko Indomaret di Jl. Lintas Teluk Kuantan-Air Molek dengan sumber sampel adalah pemilik perusahaan.

3.4 Jenis Dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini berasal dari :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang di peroleh langsung dari orang yang kita jadikan sasaran penelitian. Data-data yang ingin kita dapatkan tentulah berupa informasi-informasi atau tanggapan tentang permasalahan yang ingin kita teliti nantinya(Bungin,2005:12).

Data yang diperoleh langsung dari responden melalui penelitian lapangan, baik berupa informasi melalui kuesioner, guna memperoleh jawaban yang relevan dari permasalahan penelitian yang menggambarkan Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan maupun teknik dokumentasi dengan memanfaatkan sumber-sumber data yang

dapat menunjang objek yang di teliti berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, laporan-laporan maupun arsip-arsip yang berhubungan dengan penjelasan mengenai Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dapat digunakan untuk mengumpulkan atau mendapatkan data dari fenomena empiris. Untuk mendapatkan data dan informasi yang lebih valid, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

1. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan singingi untuk mengetahui kondisi atau keadaan yang sebenarnya serta hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

2. Angket (*Kuesioner*)

Angket (*Kuesioner*) adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya, dengan pertimbangan bahwa responden adalah subjek yang dianggap tahu tentang objek penelitian peneliti. Dalam penelitian ini penulis memberikan lembaran pertanyaan secara langsung Kepada Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten

Kuantan Singingi yang dijadikan sampel agar diketahui seberapa besar tanggapan para responden.

3. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah sebuah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil tatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai (Bungin,2005:127).

Wawancara biasanya dimaksudkan untuk memperoleh keterangan, pendirian, pendapat secara lisan dari seseorang yang disebut responden. Dengan berbicara langsung (*Face to Face*) dengan orang tersebut (Suyanto,2011:69).

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam melakukan analisa data,peneliti dibantu oleh Aplikasi Statistik Stata Versi 14. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penelitian ini hanya mencari nilai dengan teknik pengukuran interval terhadap setiap variabel. Peneliti mengambil kesimpulan dari penjelasan-penjelasan tersebut untuk Mengevaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, kemudian di analisa secara Kuantitatif yang dituangkan dalam bentuk tabel dan disertai dengan uraian.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

1 Sejarah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Riau dan Teluk Kuantan sebagai Ibu Kotanya. Kota Teluk Kuantan berjarak 160 km dari Ibu Kota Provinsi Riau yakni Kota Pekanbaru. Kabupaten Kuantan Singingi merupakan sebuah Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam, dengan Ibu Kota Teluk Kuantan. Sejak tanggal 12 oktober tahun 1999 Kbpupaten Kuantan Singingi resmi menjadi sebuah kabupaten di Provinsi Riau.

Kabupaten Kuantan Singingi pada awalnya membawahi 6 kecamatan yang dimekarkan menjadi 12 kecamatan. Selang waktu 11 tahun kemudian dimekarkan lagi 3 kecamatan baru yakni Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Sentajo Raya dan Pucuk Rantau melalui Peraturan Daerah Nomor 24 tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Sentajo Raya dan Kecamatan Pucuk Rantau. Sampai dengan saat ini Kabupaten Kuantan Singingi resmi memiliki 15 Kecamatan, yakni Kuantan Mudik, Hulu Kuantan, Gunung

Toar, Singingi, Singingi Hilir, Kuantan Tengah, Benai, Kuantan Hilir, Pangean, Logas Tanah Darat, Cerenti, Inuman, Sentajo Raya, Kuantan Hilir Seberang, Pucuk Rantau.

Sejak Kabupaten Kuantan Singingi dibentuk, Kabupaten Kuantan Singingi sudah mengalami beberapa kali pergantian Bupati hingga sekarang. Adapun pejabat-pejabat yang pernah menjadi Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1 Nama-nama Bupati Kabupaten Kuantan Singingi dan Periode Menjabat

No	Nama Bupati	Periode Jabatan
1	Drs. H. Rusdji S. Abrus	Periode Tahun 2000-2001
2	Drs. H. Asrul Ja'afar	Periode Tahun 2001-2006
3	H. Sukarmis	Periode Tahun 2006-2011
4	H. Sukarmis	Periode Tahun 2011-2016
5	Drs. H. Mursini, M.Si	Periode Tahun 2016-2021

Sumber: Data Olahan Penulis Tahun 2019

2 Luas dan Batas Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada posisi 0°00'-1°00' Lintang Selatan dan 101°02'-101°55' Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656,03 km² dengan ketinggian berkisar 25-30 meter diatas permukaan laut. Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan dengan 3 Provinsi, yaitu Provinsi Riau, Jambi dan Sumatera Barat. Batas wilayah Kabupaten Kuantan Singingi yaitu sebagai berikut:

Kecamatan Singingi Hilir (1.530,97 km²). Gambaran umum luas wilayah dan jumlah desa/kelurahan per kecamatan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4.2 Luas Wilayah Administrasi dan Jumlah Desa/Kelurahan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Luas Wilayah	Desa/Kelurahan		Total
			Desa	Kelurahan	
1	Kuantan Mudik	564,28	23	1	24
2	Hulu Kuantan	384,4	12	-	12
3	Gunung Toar	165,25	14	-	14
4	Singingi	1.953,66	13	1	14
5	Singingi Hilir	1.530,97	12	-	12
6	Kuantan Tengah	270,74	20	3	23
7	Benai	124,66	15	2	17
8	Kuantan Hilir	148,77	14	2	16
9	Pangean	145,32	17	-	17
10	Logas Tanah Darat	380,34	15	-	15
11	Cerenti	456,00	11	2	13
12	Inuman	145,70	14	-	14
13	Sentajo Raya	114,29	14	-	14
14	Kuantan Hilir Seberang	821,64	15	-	15
15	Pucuk Rantau	7.656,03	10	-	10
Total		7.656,03	218	11	229

Sumber: Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021

3 Kondisi Geografis dan Karakteristik Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi

Secara morfologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi dapat dibagi atas dataran rendah, perbukitan bergelombang, perbukitan tinggi, dan pegunungan dengan ketinggian berkisar 25–30 meter dari permukaan laut. Berdasarkan ketinggiannya Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari beberapa jenis ketinggian, sedangkan berdasarkan kemiringan tanah di Kabupaten Kuantan Singingi terbagi atas 0-2 %, 2-5 %, 5-15 %, dan >25-40 %. Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari patahan naik, patahan mendatar dan lipatan.

Disamping itu, Kabupaten Kuantan Singingi memiliki potensi sumberdaya mineral yang beragam yang dapat digali dan dimanfaatkan sebagai sumber PAD untuk pembangunan ekonomi, seperti Batubara, Emas, Sirtu, Kaolin, Bentonit, Bitumen Padat, Batu Gamping, dan Mangaan. Sebagian dari potensi sudah dieksploitasi, antara lain yaitu batu bara, emas, dan mangaan.

Untuk Daerah aliran sungai (DAS) Sungai Singingi mengalir 2 (dua) kecamatan yaitu Singingi dan Singingi Hilir. Keberadaan Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi mempunyai peranan yang sangat penting terutama sebagai sarana pemanfaatan bagi masyarakat baik segi transportasi, sumber air irigasi, usaha perikanan dan memiliki potensi sumberdaya buatan untuk menghasilkan pasokan listrik tenaga air Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya beriklim tropis dengan suhu udara maksimum di siang hari berkisar

antara 32,6° C - 36,5° C dan suhu udara minimum di malam hari berkisar antara 19,2° C - 22,0° C.

4 Kondisi Demografi Kabupaten Kuantan Singingi

1. Kependudukan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi pada tahun 2017 penduduk tercatat sebanyak 321.216 jiwa yang terdiri 164.769 jiwa laki-laki dan 156.447 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya di kecamatan Kuantan Tengah, yaitu 48.368 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Pucuk Rantau, yaitu 8.869 jiwa. Berikut adalah jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi di setiap Kecamatan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Kabupaten Kuantan Singingi

No	Kecamatan	Jenis Kelamin		Total
		Laki Laki	Perempuan	
1	Kuantan Mudik	12.180	11.983	24.163
2	Hulu Kuantan	4.531	4.338	8.869
3	Gunung Toar	7.033	6.923	13.956
4	Singingi	16.788	15.034	31.822
5	Singingi Hilir	20.244	18.180	38.424
6	Kuantan Tengah	24.776	23.592	48.368
7	Benai	8.162	8.201	16.363
8	Kuantan Hilir	7.662	7.587	15.249

9	Pangean	9.386	9.484	18.870
10	Logas Tanah Darat	10.885	9.958	20.843
11	Cerenti	7.684	7.594	15.458
12	Inuman	7.934	7.891	15.825
13	Sentajo Raya	14.766	14.072	28.838
14	Kuantan Hilir Seberang	6.715	6.649	13.364
15	Pucuk Rantau	5.843	4.961	10.804

Sumber: Badan Pusat Statisti Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2017

2. Mata Pencaharian

Mayoritas mata pencaharian masyarakat rata-rata dalam bidang pertanian. Sebanyak 61, 95% masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani. Selain itu masyarakat juga banyak memanfaatkan sektor lain seperti perkebunan, peternakan, perikanan, pertambangan dan industri.

5 Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi

1. Keagamaan

Di Kabupaten Kuantan Singingi terdapat bermacam-macam agama yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu agama Islam 305.746 jiwa (94,48%), Pemeluk agama Kristen yaitu 15.877 jiwa (4,906%), kemudian pemeluk agama Khatolik 1.465 jiwa (0,453%), pemeluk agama Hindu 27 jiwa (0,01%) dan pemeluk agama Budha 509 jiwa (0,16%).

2. Kebudayaan

Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan masyarakat yang heterogen. Dalam aspek kebudayaan, masyarakat pada umumnya adalah masyarakat melayu kuantan. Suku pendatang yang dominan diantaranya adalah suku Jawa yang datang ke Kabupaten Kuantan Singingi melalui program transmigrasi. Kemudian Kabupaten Kuantan Singingi juga dikenal dengan daerah rantauan Minang Kabau. Selain itu juga terdapat suku-suku dan etnis yang lain diantaranya Cina, Batak, Nias, Bugis, Banjar dan lain-lain.

3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar yang sangat krusial. Pendidikan formal merupakan suatu proses pendidikan yang berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Perguruan Tinggi.. Jumlah SD Negeri, SLTP Negeri, dan SLTA mengalami peningkatan yang cukup bagus, yang berarti bahwa semakin tinggi kesadaran masyarakat akan pentingnya sekolah (Wajib Belajar 9 Tahun).

Jumlah sarana pendidikan mengalami banyak peningkatan demikian juga dengan jumlah muridnya. Kabupaten Kuantan Singingi memiliki fasilitas sarana pendidikan yang berjumlah 515 yang terdiri atas 162 Taman Kanak-Kanak (TK), 342 Sekolah Dasar (SD), 70 Sekolah Menengah Pertama (SMP), 40 Sekolah Menengah Atas sederajat (SMA), dan 1 Universitas.

4. Kesehatan

Pembangunan di bidang kesehatan bertujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan secara mudah, merata dan murah. Salah satunya adalah dengan menyediakan fasilitas kesehatan, terutama Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas keliling karena ketiganya mampu menjangkau segala lapisan masyarakat hingga daerah terpencil.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, jumlah fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 7 fasilitas kesehatan. Fasilitas kesehatan tersebut terdiri atas 2 Rumah Sakit, 31 Poliklinik, 25 Puskesmas, 17 Puskesmas, 63 Puskesmas Pembantu, 370 Posyandu dan 25 Apotek.

6 **Visi dan Misi Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2016-2021**

Visi

“Terwujudnya Kabupaten Kuantan Singingi yang Unggul, Sejahtera, dan Agamis di Provinsi Riau”

Adapun makna dari visi Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi di atas sebagai berikut:

- 1 Unggul adalah peningkatan kemampuan perekonomian masyarakat, derajat kesehatan, mutu pendidikan, infrastruktur dan pariwisata.

2. Sejahtera adalah suatu kondisi masyarakat dalam keadaan makmur yang tidak lagi memikirkan kebutuhan dasar, dalam kehidupan tentram, tertib, dan harmonis.
3. Agamis adalah suasana kehidupan sosial kemasyarakatan yang rukun dan damai dalam menjalankan ajaran agama yang dianutnya.

Misi

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan pelayanan publik yang prima;
2. Meningkatkan sumberdaya manusia yang sehat, cerdas dan produktif;
3. Mengembangkan perekonomian masyarakat yang mandiri dan berdaya saing guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat berbasis pertanian dan pariwisata;
4. Meningkatkan tata kelola sumber daya alam berdasarkan perencanaan tata ruang yang berwawasan lingkungan;
5. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang berkualitas dan merata;
6. Meningkatkan suasana kehidupan yang agamis dan melestarikan nilai-nilai budaya.

4.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi Industri Dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

1 Visi dan Misi Dinas Koperasi Industri dan Perdagangan Kabupaten Kuantan Singingi

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kuantan Singingi, Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian merupakan unsur pelaksanan Pemerintah Kabupaten yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan visi yaitu **“Terwujudnya pelayanan yang cepat dan tepat dalam rangka menunjang kemandirian UMKM”**.

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi menetapkan beberapa misi, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana serta sumber pelayanan.
2. Memberikan pelayanan terbaik kepada UMKM dengan tepat terarah.
3. Mengembangkan sistem pelayanan melalui informasi dan teknologi yang mudah di akses.
4. Meningkatkan kesejahteraan UMKM melalui pelayanan yang prima.

2 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Berdasarkan Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 38 Tahun 2016 Tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Adapun tugas instansi ini adalah ***“Melaksanakan urusan rumah tangga daerah dan tugas pembantuan di bidang Perdagangan”***.

Dalam menyelesaikan tugasnya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan Kebijakan teknis di bidang Perdagangan
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang Perdagangan
3. Penyusunan rencana program dan anggaran di bidang Perdagangan
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang Perdagangan
5. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
6. Pembinaan, pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3 Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Adapun susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Kuantan Singingi adalah:

- 1. Kepala Dinas**
- 2. Sekretaris membawahi :**
 - a. Sub Bagian Umum
 - b. Sub Bagian Program dan Keuangan
- 3. Bidang Koperasi dan UKM membawahi :**
 - a. Seksi Koperasi
 - b. Seksi Usaha Mikro Kecil Menengah
 - c. Seksi Pengawasan Koperasi
- 4. Bidang Perdagangan membawahi :**
 - a. Seksi Bina Usaha Perdagangan
 - b. Seksi Informasi Pasar dan Promosi
 - c. Seksi Pengawasan Perdagangan
- 5. Bidang Perindustrian membawahi :**
 - a. Seksi Bina Usaha Industri

b. Seksi Pembinaan Permodalan dan Kerjasama Industri

c. Seksi Pengawasan Industri

Sejalan dengan hal diatas, penjabaran tugas struktur organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas

a. Tugas

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang koperasi usaha kecil menengah perdagangan dan perindustrian berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

b. Fungsi

1. Perencanaan di bidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
2. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas di bidang Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian.
3. Pemberian kajian teknis perizinan dan atau rekomendasi
4. Pengelolaan urusan kesekretariatan Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian
5. Pembinaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas Koperasi UKM, Industri dan Perdagangan

6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris

a. Tugas

Membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dinas.

b. Fungsi

1. Pengolaan data
2. Penyusunan Program dan anggaran bidang umum, program dan keuangan.
3. Pengkoordinasian penyusunan program dan anggaran Dinas Koperasi UKM
Perdagangan dan Perindustrian
4. Penyelenggaraan ketatausahaan
5. Pembinaan kepegawaian
6. Pengelolaan sarana dan prasarana
7. Penyelenggaraan urusan rumah tangga
8. Penyelenggaraan perjalanan dinas
9. Penyelenggaraan fungsi kehumasan
10. Penyelenggaraan keprotokoleran
11. Pengelolaan keuangan
12. Pengkoordinasian dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan
13. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan dibantu oleh:

- a. Sub bagian Umum
- b. Sub bagian Program dan keuangan
3. Bidang Koperasi UKM

a. Tugas

Membantu Kepala dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembina pengawasan, evaluasi dan pelaporan pada seksi kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi UKM , fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang bina kelembagaan dan kemitraan, Bina usaha Koperasi UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang bina usaha koperasi UKM, dan fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang bina kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
4. Pelaksanaan pembiayaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bina usaha kelembagaan dan kemitraan, bina usaha koperasi dan UKM, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatas, Kepala Bidang Koperasi UKM dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Usaha Perdagangan
- b. Seksi Informasi Pasar dan Promosi
- c. Seksi Metrologi dan Perlindungan Konsumen

4. Bidang Perdagangan

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang perdagangan.

b. Fungsi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang perdagangan
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang perdagangan
3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dibidang perdagangan
4. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan di bidang perdagangan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatas, Kepala Bidang Perdagangan dibantu oleh :

- a. Seksi Bina Usaha dan Sarana Prasarana Perdagangan
- b. Seksi Informasi Pasar, Promosi dan Penataan Perdagangan
- c. Seksi Pengawasan Perdagangan.

5. Bidang Perindustrian

a. Tugas

Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan kerjasama industri.

b. Fungsi

1. Perumusan Kebijakan teknis dibidang bina usaha industri, pembinaan pengembangan permodalan dan kerjasama industri, pengawasan industri.
2. Penyusunan rencana program dan anggaran dibidang usaha industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama industri.
3. Pengorganisasian pelaksanaan tugas dibidang industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama industri.
4. Pelaksanaan pembinaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan dibidang usaha industri, pembinaan, pengembangan permodalan dan kerjasama industri

5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diatas, Kepala Bidang Industri diantu oleh:

- a. Seksi Bina Usaha Industri
- b. Seksi Pembinaan, Permodalan dan Kerjasama Industri
- c. Seksi Pengawasan Industri.



BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1 Hasil Penelitian

Dalam bab ini akan dibahas tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas. Pembahasan akan meliputi hasil penelitian dengan sumber data dari Kuesioner yang telah diisi sampel atau responden masing-masing oleh sampel Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian dan Pelaku Usaha Indomaret.

1. Deskripsi Hasil Penelitian

- **Identitas Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

Tingkat Pendidikan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1 Identitas Responden Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Tingkat Pendidikan

```
1 . tabulate Dinas
```

Dinas	Freq.	Percent	Cum.
S1	2	40.00	40.00
S2	3	60.00	100.00
Total	5	100.00	

```
2 . tabulate Indomaret
```

Indomaret	Freq.	Percent	Cum.
S1	6	66.67	66.67
S2	3	33.33	100.00
Total	9	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

Dari tabel 5.1 diatas dapat dilihat tingkat pendidikan responden, berdasarkan data yang berhasil di peroleh peneliti bahwa tingkat pendidikan responden pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 3 Orang sebesar 60% lulusan S1 dan 2 Orang sebesar 40% lulusan Strata 2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi adalah Strata 1. Sedangkan Tingkat Pendidikan responden Pelaku Usaha Indomaret sebanyak 6 Orang sebesar 66.67% lulusan S1 dan 3 Orang sebesar 33.33% lulusan S2. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata jenjang pendidikan Pelaku Usaha Indomaret S1.

2. Jenis Kelamin

Jenis kelamin Responden dalam penelitian ini dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2 Identitas Responden Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, Berdasarkan Jenis Kelamin

1 . tabulate Dinas

Dinas	Freq.	Percent	Cum.
Laki-laki	3	60.00	60.00
Perempuan	2	40.00	100.00
Total	5	100.00	

2 . tabulate Indomaret

Indomaret	Freq.	Percent	Cum.
Laki-laki	7	77.78	77.78
Perempuan	2	22.22	100.00
Total	9	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

Dari tabel 5.2 diatas, dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi laki-laki sebanyak 3 Orang sebesar 60% dan 2 Orang sebesar 40% berjenis kelamin Perempuan. Sedangkan Jenis Kelamin Responden Pelaku Usaha Indomaret laki-laki sebanyak 7 Orang sebesar 77.78% dan 2 Orang sebesar 22.22% berjenis kelamin Perempuan.

3. Identitas Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia

Identitas responden berdasarkan latar belakang usia untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.3 Klasifikasi Responden Berdasarkan Latar Belakang Usia Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi

2 . tabulate Dinas

Dinas	Freq.	Percent	Cum.
Usia 41-50 Tahun	1	20.00	20.00
Usia 51-60 Tahun	4	80.00	100.00
Total	5	100.00	

3 . tabulate Indomaret

Indomaret	Freq.	Percent	Cum.
Usia 20-30 Tahun	2	22.22	22.22
Usia 31-40 Tahun	3	33.33	55.56
Usia 41-50 Tahun	2	22.22	77.78
Usia 51-60 Tahun	2	22.22	100.00
Total	9	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa usia pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi dengan kategori usia yang paling banyak yaitu 51-60 sebanyak 4 Orang atau dengan persentase 80%, dan usia 41-50 sebanyak 1 Orang atau 20%. Sedangkan Pelaku Usaha Indomaret Usia 20-30 Tahun sebanyak 2 Orang sebesar 22.22%, Usia 31-40 Tahun sebanyak 3 Orang sebesar 33.33%, Usia 41-50 Tahun sebanyak 2 Orang sebesar 22.22% dan Usia 51-60 Tahun sebanyak 2 Orang sebesar 22.22%.

5.2 Deskripsi Hasil Penelitian Variabel *Input, Process, Output, Outcome* dalam Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian.

1. Masukan (*Input*)

Evaluasi pelaksanaan pengawasan izin operasional indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi dapat di ukur salah satunya dengan melihat masukan (*Input*), yaitu masukan yang diperlukan untuk pelaksanaan kebijakan. Instrumen *Input* atau masukan yang umumnya terjadi didalam kebijakan di bentuk oleh pemangku kepentingan terhadap kebijakan tersebut. Pemangku kepentingan dalam kebijakan yang menjalankan pelaksanaan instrumen tersebut dalam penelitian ini adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian. Pada dasarnya alat ukur kebijakan yang dilakukan pada tahapan awal hasil dari

pengambilan keputusan, setelah itu baru diagendakan di dalam formulasi kebijakan dengan memperhatikan aspek kepentingan publik (*Public Of Interest*). Setiap indikator dari instrumen tersebut harus dapat di implementasikan apabila program kebijakan tersebut mandet harus ada satu proses inkremental polisi yang umumnya dilakukan oleh aktor. Aktor-aktor tersebut mengambil sudut pandang dari *Outcome* Kebijakan sehingga selalunya *Outcome* Kebijakan itu yang akan selalu di perbaiki *Input*.

Sehubungan dengan evaluasi pelaksanaan pengawasan izin operasional keberadaan indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, dilihat dari aspek masukan (*Input*) dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Untuk mengetahui hasil kuesioner jawaban atau tanggapan dari responden pengawasan indomaret yang berjumlah 5 Orang responden terhadap indikator masukan (*Input*) yang terdiri dari 2 dimensi Indikator yaitu sumber daya pendukung dan sarana pendukung. Untuk itu perlu kiranya di ketahui dari jawaban responden tentang indikator *Input* dalam evaluasi pelaksanaan pengawasan izin operasional keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian, untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.4:

Tabel 5.4 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Indikator *Input*

. tabulate INPUT

Sumber Daya Pendukung (Dinas)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	5	33.33	33.33
Sangat Setuju(5)	1	6.67	40.00
Sangat Tidak Setuju(1)	1	6.67	46.67
Setuju(4)	6	40.00	86.67
Tidak Setuju(2)	2	13.33	100.00
Total	15	100.00	

Sarana Pendukung (Dinas)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	4	66.67	66.67
Tidak Setuju(2)	2	33.33	100.00
Total	6	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019.

Interval Kelas = Jumlah Tertinggi – Jumlah Terendah

Jumlah Kelas

$$5 \times 1 = 5$$

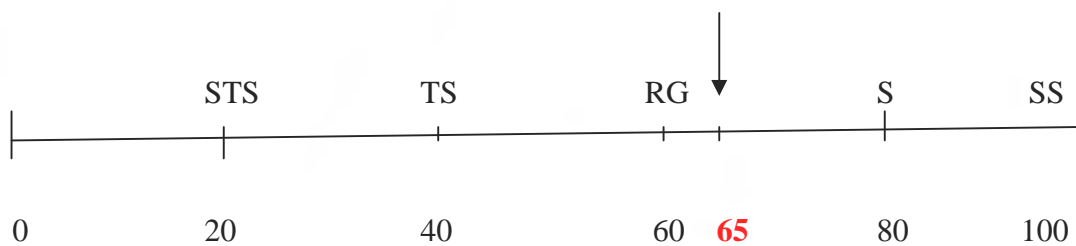
$$4 \times 6 = 24$$

$$3 \times 9 = 27$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$1 \times 1 = 1$$

$$= 65$$



Dari data tabel 5.4 hasil dari jawaban responden Dinas terhadap Sumber Daya Pendukung yang paling banyak menjawab Setuju sebesar 40% dan paling sedikit menjawab Sangat Setuju dan Sangat Tidak Setuju sebesar 66.67%. Sedangkan terhadap Sarana Pendukung responden paling banyak menjawab Ragu-ragu sebesar 66.67% dan paling sedikit menjawab Tidak Setuju sebesar 33.33%.

Dari tabel diatas tanggapan responden Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi pada Indikator *Input* dilihat dari skala pengukuran berada pada Interval 65 pada kategori **Setuju**.

Menurut Bridgman & Davis (2000) *Input* yaitu memfokuskan pada penilaian apakah sumber daya pendukung dan bahan-bahan dasar yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan. Indikator ini dapat meliputi sumber daya manusia, uang atau infrastruktur pendukung lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Dinas, Kepala Bidang Perdagangan dan Kasi Pengawasan Perdagangan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sumber daya manusia di Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan

Untuk mengetahui hasil kuesioner jawaban responden atau tanggapan dari responden pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi berjumlah 5 Orang terhadap indikator Proses (*Process*). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel 5.5 berikut :

Tabel 5.5 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pegawai Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Indikator *Process*

. tabulate PROCESS

Prosedur dan Mekanisme (Dinas)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu (3)	7	46.67	46.67
Sangat Setuju (5)	1	6.67	53.33
Setuju (4)	2	13.33	66.67
Tidak Setuju (2)	5	33.33	100.00
Total	15	100.00	

Efektivitas dan Efisiensi (Dinas)	Freq.	Percent	Cum.
Sangat Tidak Setuju (1)	1	25.00	25.00
Setuju (4)	1	25.00	50.00
Tidak Setuju (2)	2	50.00	100.00
Total	4	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

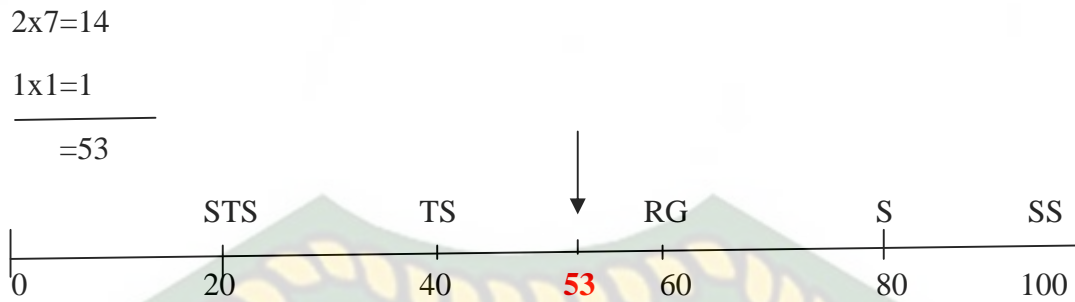
Interval Kelas = Jumlah Tertinggi – Jumlah Terendah

Jumlah Kelas

$$5 \times 1 = 5$$

$$4 \times 3 = 12$$

$$3 \times 7 = 21$$



Dari data tabel 5.5 hasil dari jawaban responden Dinas terhadap Prosedur dan Mekanisme yang paling banyak menjawab Ragu-ragu sebesar 46.67% dan paling sedikit menjawab Sangat Setuju sebesar 6.67%. Sedangkan terhadap Efektivitas dan Efisiensi responden paling banyak menjawab Tidak Setuju sebesar 50% dan paling sedikit menjawab Sangat Tidak Setuju dan Setuju sebesar 25%.

Dari Tabel diatas tanggapan responden Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi pada Indikator *Process* dilihat dari skala pengukuran berada pada Interval 53 pada kategori **Ragu-ragu**.

Menurut Bridgman & Davis (2000) *Process* yaitu memfokuskan pada penilaian bagaimana sebuah kebijakan di transformasikan dalam bentuk pelayanan langsung kepada masyarakat. Indikator ini meliputi aspek efektivitas dan efisiensi dari metode atau cara yang dipakai untuk melaksanakan kebijakan publik tertentu.

Prosedur atau Mekanisme dalam pengurusan izin yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik hanya saja petunjuk daerah tidak ada yang ada hanya petunjuk pusat.

Tabel 5.6 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Indikator *Output*.

. tabulate OUTPUT

Hasil Pelaksanaan Tugas (Indomaret)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu (3)	5	27.78	27.78
Sangat Setuju (5)	2	11.11	38.89
Sangat Tidak Setuju (1)	2	11.11	50.00
Setuju (4)	4	22.22	72.22
Tidak Setuju (2)	5	27.78	100.00
Total	18	100.00	

Tingkat Pencapaian Tujuan (Indomaret)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu (3)	2	22.22	22.22
Sangat Setuju (5)	1	11.11	33.33
Sangat Tidak Setuju (1)	2	22.22	55.56
Setuju (4)	2	22.22	77.78
Tidak Setuju (2)	2	22.22	100.00
Total	9	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

Interval Kelas = Jumlah Tertinggi – Jumlah Terendah

Jumlah Kelas

$$5 \times 3 = 15$$

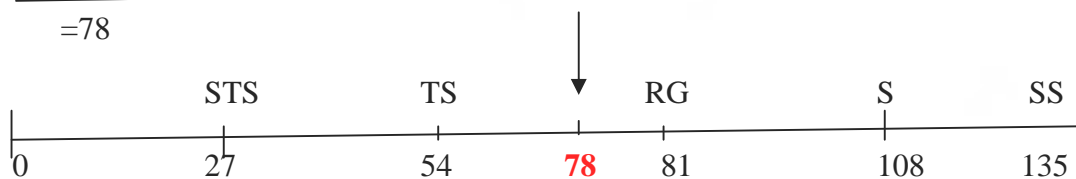
$$4 \times 6 = 24$$

$$3 \times 7 = 21$$

$$2 \times 7 = 14$$

$$1 \times 4 = 4$$

$$= 78$$



Dari data tabel 5.6 hasil dari jawaban responden Pelaku Usaha Indomaret terhadap Hasil Pelaksanaan Tugas yang paling banyak menjawab Ragu-ragu dan Tidak Setuju sebesar 27.78% dan paling sedikit menjawab Sangat Setuju dan Sangat Tidak Setuju sebesar 11.11%. Sedangkan terhadap Tingkat Pencapaian Tujuan responden paling banyak menjawab Ragu-ragu, Sangat Tidak Setuju, Tidak Setuju, dan Setuju sebesar 22.22% dan paling sedikit menjawab Sangat Setuju sebesar 11.11%.

Dari Tabel diatas tanggapan responden Pelaku Usaha Indomaret pada Indikator *Output* dilihat dari skala pengukuran berada pada Interval 53 pada kategori **Ragu-ragu**.

Menurut Bridgman & Davis (2000) *Output* yaitu memfokuskan penilaian pada hasil atau produk yang dapat dihasilkan dari sistem atau proses kebijakan publik.

Hasil dari pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi kurang maksimal karena keterbatasan anggaran dan transportasi dalam melakukan pengawasan langsung kelapangan sehingga masih ada Indomaret yang tidak berizin sudah beroperasi. Dan masih kurang antisipasi Pelaku Usaha dalam mengikuti prosedur perizinan Indomaret.

Tabel 5.7 Distribusi Frekuensi Tanggapan Responden Pelaku Usaha Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Indikator *Outcome*

. tabulate OUTCOME

Pengaruh Terhadap Target Pasaran (Indomaret)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	3	33.33	33.33
Sangat Setuju (5)	1	11.11	44.44
Setuju (4)	3	33.33	77.78
Tidak Setuju(2)	2	22.22	100.00
Total	9	100.00	

Dampak Luas (Indomaret)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	4	44.44	44.44
Sangat Tidak Setuju (1)	2	22.22	66.67
Setuju (4)	1	11.11	77.78
Tidak Setuju(2)	2	22.22	100.00
Total	9	100.00	

Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

Interval Kelas = Jumlah Tertinggi – Jumlah Terendah

Jumlah Kelas

$$5 \times 1 = 5$$

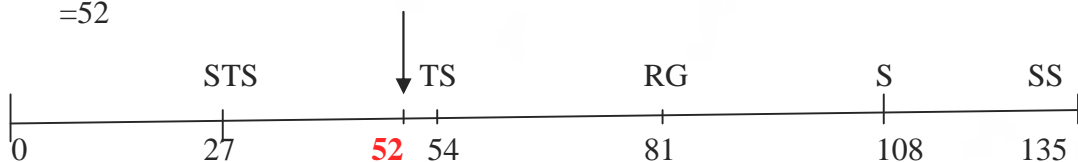
$$4 \times 4 = 16$$

$$3 \times 7 = 21$$

$$2 \times 4 = 8$$

$$1 \times 2 = 2$$

$$= 52$$



Dari data tabel 5.7 hasil dari jawaban responden Pelaku Usaha Indomaret terhadap Pengaruh Target Sasaran yang paling banyak menjawab Ragu-ragu dan

pada pengujian t 10% n=14 dengan degree freedom (Df=n-k) atau (Df=14-1)=13 hasilnya adalah 1.77093. karena t hitung kecil (-0.7087) < t tabel 1.77093. karena t hitung terletak di dalam t tabel maka keputusan Ho di terima.

5.3 Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

Dari pembahasan masing-masing indikator di atas untuk mengetahui keseluruhan tanggapan responden Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian dan Pelaku Usaha Indomaret Kabupaten Kuantan Singingi dalam pelaksanaan pengawasan izin operasional keberadaan indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi, maka dilakukan rekapitulasi responden pengawasan izin operasional Indomaret dalam bentuk tabel hipotesis jawaban responden yang dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.8 Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian

```
. tabulate INPUT
```

Dinas	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	9	42.86	42.86
Sangat Setuju (5)	1	4.76	47.62
Sangat Tidak Setuju (1)	1	4.76	52.38
Setuju (4)	6	28.57	80.95
Tidak Setuju (2)	4	19.05	100.00
Total	21	100.00	

```
. tabulate PROCESS
```

(Dinas)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	7	36.84	36.84
Sangat Setuju (5)	1	5.26	42.11
Sangat Tidak Setuju (1)	1	5.26	47.37
Setuju (4)	3	15.79	63.16
Tidak Setuju(2)	7	36.84	100.00
Total	19	100.00	

```
. tabulate OUTPUT
```

(Indomaret)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	7	25.93	25.93
Sangat Setuju (5)	3	11.11	37.04
Sangat Tidak Setuju (1)	4	14.81	51.85
Setuju (4)	6	22.22	74.07
Tidak Setuju(2)	7	25.93	100.00
Total	27	100.00	

```
. tabulate OUTCOME
```

(Indomaret)	Freq.	Percent	Cum.
Ragu-Ragu(3)	7	38.89	38.89
Sangat Setuju (5)	1	5.56	44.44
Sangat Tidak Setuju (1)	2	11.11	55.56
Setuju (4)	4	22.22	77.78
Tidak Setuju(2)	4	22.22	100.00
Total	18	100.00	

```
.
```


Sumber: StataVersi 14 Tahun 2019

Dari data tabel 58 Hasil Rekapitulasi Jawaban Responden Tentang Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Izin Operasional Keberadaan Indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian pada Indikator *Input* yang paling banyak menjawab Ragu-ragu dengan persentase sebesar 42.86%. Pada Indikator *Process* yang paling banyak menjawab Ragu-ragu dan Tidak Setuju dengan persentase sebesar 36.84%. Pada Indikator *Output* yang paling banyak menjawab Ragu-ragu dan Tidak Setuju dengan persentase sebesar 25.93%. Sedangkan Pada Indikator *Outcome* yang paling banyak menjawab Ragu-ragu dengan persentase sebesar 38.89%.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan izin operasional indomaret oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi, dapat disimpulkan sebagai berikut :

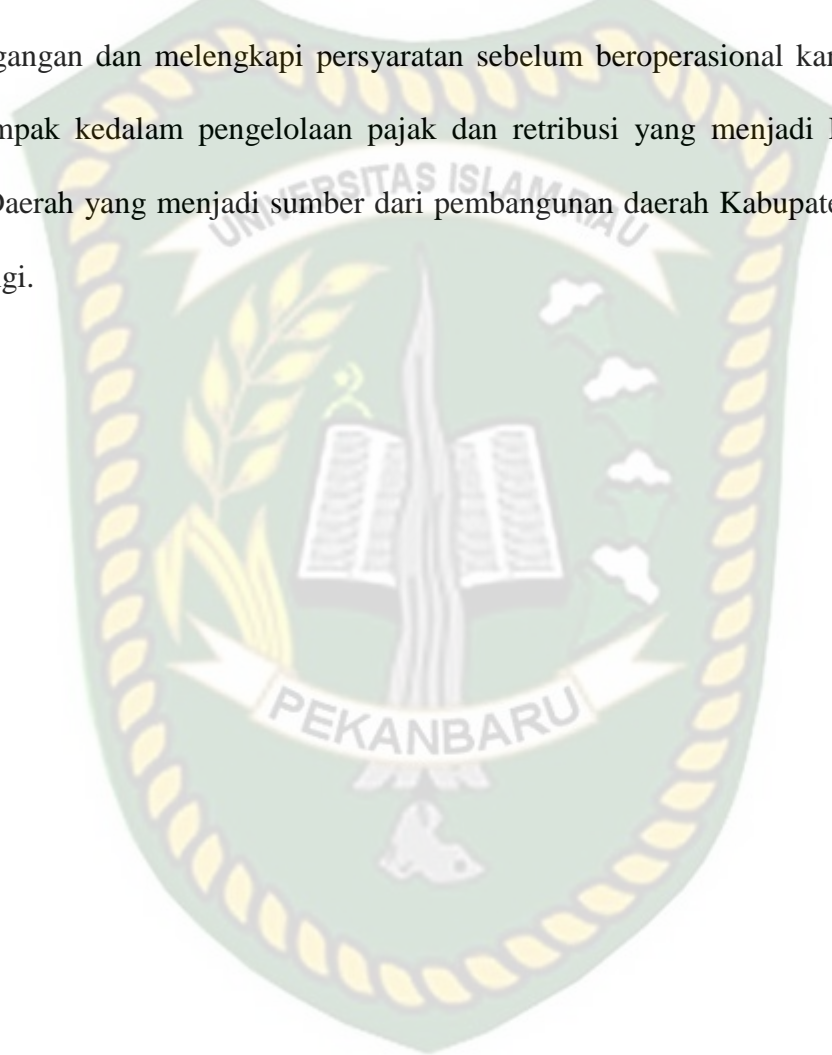
1. Berdasarkan penelitian, bahwa pengawasan yang dilakukan Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuantan Singingi sudah baik.
2. Bahwa dari hasil kuesioner responden izin operasional indomaret di peroleh hasil penilaian pada kategori baik. Maka penilaian Evaluasi dari pelaksanaan pengawasan izin operasional indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi dikatakan efektif.
3. Dari hasil penelitian, menunjukkan pelaksanaan pengawasan izin operasional indomaret di Kabupaten Kuantan Singingi Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian yang di tentukan dari 4 Indikator yaitu *Input, Process, Output, Outcome* dapat dikatakan baik.

6.2 Saran

1. Guna menciptakan Evaluasi pelaksanaan pengawasan izin operasional indomaret yang efektif dan efisien hendaknya Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian melakukan survey lapangan

berkelanjutan, tidak hanya sekali dalam sebulan, agar mengetahui adanya Indomaret yang sudah beroperasi tetapi belum memiliki izin.

2. Untuk Pelaku Usaha Indomaret agar dapat mengurus Surat Izin Usaha Perdagangan dan melengkapi persyaratan sebelum beroperasi karena sangat berdampak kedalam pengelolaan pajak dan retribusi yang menjadi Pendapatan Asli Daerah yang menjadi sumber dari pembangunan daerah Kabupaten Kuantan Singingi.



DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zaini dan Raden Imam Alhafis. 2015. *Teori Kebijakan Publik*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.
- Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Riau, 2009. Pekanbaru, Universitas Islam Riau.
- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor, Ghalia Indonesia.
- Hasibuan, Malayu. 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Henry, Nicholas. 1988. *Administrasi Negara dan Masalah – Masalah Kenegaraan*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Jakarta, Erlangga.
- Martono, Nanang. 2016. *Metode penelitian Kuantitatif analisis isi dan analisis data sekunder*. Jakarta, RajaGrafindo Persada.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung, Alfabeta.
- Ritonga, Hasnun Jauhari. 2015. *Manajemen Organisasi Pengantar Teori dan Praktek*. Medan, Perdana Publishing.
- Safri, Wirman. 2012. *Studi Tantang Administrasi Publik*. Jakarta, Erlangga.
- Solihin, Ismail. 2009. *Pengantar Manajemen*. Jakarta, Erlangga.
- Sugandi, Yogi Suprayogi. 2011. *Administrasi Publik Konsep Dan Perkembangan Ilmu di Indonesia*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono. 2002. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung, Alfabeta.

Sujanto. 1986. *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*. Jakarta Timur, Balai Aksara, Yudhistira, Pustaka Saadiyah.

Supardi dan Syaiful Anwar. 2002. *Dasar – Dasar Perilaku Organisasi*. Jogjakarta, UII Press Jogjakarta.

Syafiie, Inu Kencana. 2010. *Ilmu Administrasi Publik*. Jakarta, Rineka Cipta.

Thoah, Miftah. 1990. *Aspek – Aspek Pokok Ilmu Administrasi Suatu Bunga Rampai Bacaan*. Jakarta, Ghalia Indonesia.

Zulkifli dan Moris A. Yogya. 2014. *Fungsi – Fungsi Manajemen*. Pekanbaru, Marpoyan Tujuh.

<http://sangit26.blogspot.com>

<http://charlessigaulian.blogspot.co.id/2013/12/?m=1>

pekanbaru.tribunnews.com

iingsaputrapratama.blogspot.com

DOKUMENTASI

Undang – undang Nomor 07 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, pusat pembelanjaan dan toko – toko modern.

Peraturan Daerah Kabupaten Kuantan Singingi Nomor 4 tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kuantan Singingi



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau